

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN FUNDAMENTAL**



**PERUMUSAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM DAN PEMETAAN POTENSI EKONOMI
BAGI MASYARAKAT WILAYAH PESISIR
DI PROPINSI RIAU
(Tahun I)**

Penanggung Jawab Program

**Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIDN 0022086001**

**UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
Desember, 2012**

PENELITIAN FUNDAMENTAL



**PERUMUSAN MODEL PENGENTASAN KEMISKINAN
MELALUI PROGRAM DAN PEMETAAN POTENSI EKONOMI
BAGI MASYARAKAT WILAYAH PESISIR
DI PROPINSI RIAU**

Tim Peneliti:

**Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP.
Suarman, Drs., MPd**

**LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
Desember, 2012**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau**
2. Ketua Peneliti
Nama Lengkap : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
Jenis Kelamin : Laki-laki
N I P : 19600822 199002 1002
NIDN : 0022086001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama/ IV.e
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Unit Kerja : Universitas Riau
Fakultas/Prodi : Keguruan/Pendidikan Ekonomi
Lembaga Penelitian : Universitas Riau Pekanbaru
Alamat Rumah : Jl. Purwodadi No 151, Kelurahan Sidomulyo Barat Pekanbaru. 28294
Telepon (0761) 64167; 08127533089
e-mail: asyahza@yahoo.co.id
3. Usul Jangka Waktu Penelitian : 2 (dua) tahun
4. Biaya Diperlukan :
 - a. Tahun pertama (2012) : **Rp 35.000.000**
 - b. Tahun kedua (2013) : Rp 48.830.000
 - c. Biaya dari Instansi Lain : -

Pekanbaru, 15 Desember 2012

Mengetahui;
Dekan FKIP Unri

Ketua Peneliti,

Dr. H. M. Nur Mustafa, MPd
NIP. 19601013 198603 1002

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP. 19600822 199002 1002

Mengetahui;
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Riau

Prof. Dr. Usman M. Tang, MS
NIP. 19640501 198903 1 001

RINGKASAN PENELITIAN

Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan potensi yang ada di daerah perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat. Propinsi Riau yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir masih mempunyai banyak daerah-daerah terisolir dan penduduk miskin dengan keterbatasan sarana transportasi akibat kondisi geografis daerah yang pada umumnya berawa. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengintensifkan kegiatan pembangunan yang orientasinya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara untuk membuat prioritas-prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan program pembangunan ekonomi khususnya untuk daerah pedesaan.

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%); 2) infrastruktur

dasar belum memadai; 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan; 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi; 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Perspektif pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) Pengembangan kawasan ekonomi khusus di Selatpanjang dan Ransang; 2) Pengembangan cluster industri berbasis pertanian; 3) Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri Dorak; 4) Pengembangan kawasan industri Tebing tinggi Barat; 5) Pengembangan kawasan industri Pulau Ransang; 6) Pengembangan komoditas unggulan daerah dalam rangka ketahanan pangan Operasi Pangan Riau Makmur; 7) Pengembangan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya patin jambal dan pertambakan udang; 8) Pengembangan bidang peternakan khususnya ternak sapi, kambing, dan itik; 9) Revitalisasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopi dan kakao.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk prioritas pembangunan jangka menengah Tahun 2011-2015: 1) Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local; 5) Meningkatkan Infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi; 6) Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi; dan 7) Meningkatkan pembinaan mental spritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

KATA PENGANTAR

Penelitian Fundamental yang berjudul Perumusan Model Pengetasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau yang dibiayai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2012.

Tujuan kegiatan penelitian ini adalah untuk menemukan model pengetasan kemiskinan di wilayah pesisir. Model yang dimaksudkan untuk mencoba menetralsir dikotomi-dikotomi dari pembagian pendapatan yang tidak adil antara masyarakat wilayah pesisir dengan masyarakat wilayah daratan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam upaya mengintensifkan kegiatan pembangunan yang orientasinya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan demikian pembuat kebijakan dalam pembangunan dapat membuat prioritas-prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat pesisir. Dari sisi lain setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan dapat merumuskan kegiatan-kegiatan atau strategi apa yang mesti ditempuh oleh pemerintah daerah untuk pengembangan masyarakat pesisir dan mengoptimalkan potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat pesisir itu sendiri.

Penelitian ini didanai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan tahun anggaran 2012. Karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan dan menyediakan dana untuk Penelitian Fundamental ini. Semoga hasil kerja ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.

Pekanbaru, Desember 2012

TimPenelitia

DAFTAR ISI

RINGKASAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. MASALAH PENELITIAN	1
BAB II. KAJIAN PUSTAKA YANG SUDAH DILAKSANAKAN	4
BAB III. TUJUAN DAN PENERAPAN PENELITIAN	11
BAB IV. METODE PELAKSANAAN PENELITIAN	13
BAB V. LUARAN PENELITIAN YANG DITARGETKAN	18
BAB VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN	36
PUSTAKA ACUAN.....	37
LAMPIRAN ARTIKEL HASIL PENELITIAN	40

BAB I MASALAH PENELITIAN

Pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang, terutama di wilayah pesisir.

Kondisi tersebut akan menyebabkan daerah-daerah tertinggal sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya karena selain pembangunan yang selama ini distortif juga karena masyarakat pedesaan tersebut berada dalam posisi yang tidak menguntungkan; seperti pendidikan dan keterampilan



yang rendah, tidak ada modal usaha, tidak punya tanah atau luasnya yang tidak layak dan lain-lain. Di samping itu masyarakat daerah tertinggal terutama di wilayah pesisir relatif terisolir dengan jumlah penduduk yang relatif jarang sehingga potensinya untuk berkembang menjadi terhambat. Untuk mengatasi kesenjangan ini maka perlu dilakukan terebosan dalam bentuk program penataan ruang, penataan lembaga ekonomi pedesaan, penataan pemukiman penduduk, dan penyempurnaan sarana dan prasarana sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.



Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dengan memperhatikan daerah

yang terbelakang, daerah padat dan jarang penduduk, daerah transmigrasi, daerah terpencil dan perbatasan, serta mempercepat pembangunan kawasan Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan prioritas daerah. Dalam tahun-tahun mendatang, agenda pembangunan ekonomi daerah akan didominasi oleh program desentralisasi dan pengembangan otonomi daerah.

Propinsi Riau yang sebagian wilayahnya merupakan daerah pesisir masih mempunyai banyak daerah-daerah terisolir dan penduduk miskin dengan keterbatasan sarana transportasi akibat kondisi geografis daerah yang pada umumnya berawa. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengintensifkan kegiatan pembangunan yang orientasinya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan cara untuk membuat prioritas-prioritas pembangunan yang bertujuan untuk memacu pertumbuhan perekonomian masyarakat pedesaan. Sebagai gambaran pada Tabel 1 disajikan penyebaran penduduk dan rumah tangga miskin di Propinsi Riau.



Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Miskin di Propinsi Riau Tahun 2009

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk	Penduduk Miskin		Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	
			Jiwa	%		KK	%
1	Kuantan Singingi	243.768	66.920	27,45	58.923	16.764	28,45
2	Indragiri Hulu	283.315	88.444	31,22	62.621	20.387	32,56
3	Indragiri Hilir	624.450	199.452	31,94	136.585	46.255	33,87
4	Pelelawan	209.488	38.977	18,61	48.594	9.675	19,91
5	Siak	267.886	62.715	23,41	64.127	13.331	20,79
6	Kampar	530.886	120.498	22,70	113.656	30.126	26,51
7	Rokan Hulu	337.494	70.141	20,78	75.903	17.670	23,28
8	Bengkalis	620.766	139.973	22,55	122.676	29.485	24,03
9	Rokan Hilir	482.140	95.932	19,90	142.296	21.155	14,87
10	Pekanbaru	704.517	76.841	10,91	148.532	16.158	10,88
11	Dumai	215.783	38.515	17,85	45.418	8.340	18,36
12	Kepulauan Meranti*						
Riau		4.520.493	998.408	22,09	1.019.331	229.346	22,50

* Kabupaten Kepulauan Meranti hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 2009
 Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Propinsi Riau (2010)

Guna memacu pertumbuhan ekonomi di daerah khususnya di pedesaan, Pemerintah Daerah Riau mencanangkan pembangunan Daerah Riau melalui program pemberantasan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (lebih dikenal dengan program K2I). Setiap pembangunan yang dilaksanakan di Daerah Riau harus mengacu kepada Program K2I. Karena pembangunan daerah sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan potensi yang ada di daerah perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Berkaitan dengan informasi tersebut, pertanyaan yang diajukan adalah: Bagaimana bentuk model pengentasan kemiskinan melalui program dan pemetaan potensi ekonomi bagi masyarakat wilayah pesisir di Propinsi Riau ?

BAB II

KAJIAN PUSTAKA YANG SUDAH DILAKSANAKAN

1. Kegiatan yang Telah Dilaksanakan

Secara umum kemiskinan lazim didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara lain tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Definisi beranjak dari pendekatan berbasis hak yang menyatakan bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat (muhammad Hambali, 2008).

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2007a), dijelaskan terdapat kecenderungan hubungan positif antara ketertinggalan suatu daerah (diindikasikan dengan daerah penerima IDT) dengan tingkat kemiskinan penduduknya. Artinya daerah yang tertinggal tingkat pembangunannya cenderung lebih lambat, penduduknya relatif jarang dan miskin. Karena itu daerah-daerah ini juga lebih intensif digunakan sebagai daerah perkebunan besar terutama oleh perkebunan swasta yang cenderung memarginalkan penduduk setempat karena tanah pertanian mereka semakin berkurang untuk berusaha.

Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan salah satunya akibat kebijakan yang *mismatch* di masa lalu, yaitu kebijakan yang melupakan sektor pertanian sebagai dasar keunggulan komparatif maupun kompetitif. Sesungguhnya pemberdayaan ekonomi juga membangun kekuatan ekonomi Indonesia berdasarkan kepada masyarakat pedesaan bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat pedesaan itu sendiri, tetapi keunggulan komparatif dan kompetitif

yang dimiliki (Yuswar Zainal Basri, 2003). Untuk daerah pedesaan keunggulan komparatif sangat ditentukan oleh potensi sumberdaya alam yang dimiliki. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) pengembangan tanaman perkebunan; 3) pengembangan usaha perikanan; 4) pengembangan usaha peternakan; 5) pengembangan usaha pertambangan; 6) pengembangan sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan. Pembangunan ekonomi kerakyatan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan sangat ditekankan kepada pengelolaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Dari sisi lain pemerintah telah berusaha mengembangkan usaha ekonomi mikro di pedesaan yang pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pedesaan. Namun sebagian besar masyarakat peesaan tidak mampu untuk memanfaatkan program



tersebut, hal ini disebabkan karena ketidak terampilan mereka dalam berusaha (Almasdi Syahza 2009a). Modal utama masyarakat di daerah pedesaan adalah tanah pertanian. Oleh karena itu sedikit saja terjadi perubahan dalam produksi pertanian akan mempengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat. Apabila masyarakat di daerah pedesaan mengalami kegagalan dalam usahatani, maka mereka akan berusaha mencari sumber pendapatan lain yang segera dapat mengatasi kesulitannya. Salah satu sumber bantuan tersebut ialah lembaga-lembaga perkreditan yang ada di daerahnya. Dana yang diperoleh dari lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan bantuan dalam menunjang proses produksi pertanian bagi masyarakat pedesaan (Almasdi Syahza, 2010b).

Keberhasilan pembangunan pedesaan di wilayah Riau khususnya Riau Bagian Barat (Riua Daratan) yang dikembangkan melalui subsektor perkebunan telah mampu merubah ekonomi masyarakat pedesaan. Hasil penelitian Almasdi Syahza (20010a), kegiatan perkebunan kelapa sawit telah memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi

wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan terhadap aspek sosial ekonomi antara lain adalah: 1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; 2) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Di sisi lain kegiatan perkebunan kelapa sawit yang secara langsung memberikan pengaruh terhadap komponen sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar antara lain: 1) Penyerapan tenaga kerja lokal; 2) Kegiatan pembinaan masyarakat pedesaan; 3) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; dan 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan.

Untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, kebijakan ekonomi harus menganut paradigma baru yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis sumberdaya lokal, karena sebagian besar hidup mereka pada sumberdaya yang tersedia di daerahnya. Salah satu yang menonjol sumberdaya di pedesaan adalah sektor pertanian dan nelayan. Pelaksanaan pembangunan pertanian dan nelayan di daerah pedesaan harus dirancang dengan sistem agribisnis yang melibatkan berbagai lembaga ekonomi dan lembaga penunjang, antara lain; lembaga ekonomi masyarakat (koperasi), lembaga perkreditan, pengusaha tani (petani), dan pengusaha. Koperasi merupakan pusat kegiatan agribisnis yang tepat untuk setiap unit usaha di pedesaan terutama untuk pengolahan dan pemasaran produk pertanian. Koperasi berbasis agribisnis harus dapat menunjang berkembangnya subsistem agribisnis (perdagangan sarana produksi pertanian, kegiatan usaha tani, pengolahan hasil pertanian, jasa layanan pendukung), penyedia informasi pasar bagi anggota, dapat menerapkan teknologi pertanian, dan pelaku utama kegiatan agroindustri. Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan multiplier efek ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Agribisnis dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi pedesaan sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan mereka (Almasdi Syahza, 2009b).

Bentuk dan fungsi lembaga perkreditan dapat membawa malapetaka bagi sebagian masyarakat pedesaan, apabila lembaga perkreditan tersebut tidak mampu mendorong proses perubahan ekonomi, sosial dan budaya

masyarakat. Dalam situasi demikian akan sulit untuk mengembangkan suatu sistem perkreditan yang efektif dan berdayaguna, karena: *Pertama*, masyarakat pedesaan kurang mempunyai uang dan barang-barang yang "likuid", serta kurang berpengalaman dalam menggunakan uang; dan *kedua*, masyarakat pedesaan diwarnai oleh kewajiban-kewajiban sosial, sehingga dana kredit untuk modal kerja dan produksi sering dialihkan untuk memenuhi kewajiban sosial (Almasdi Syahza, 2010c). Kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk pengembangan pertanian pada masa datang terfokus pada peningkatan sumberdaya manusia baik petani maupun para pelaku pembangunan koperasi. Semua upaya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan koperasi dan petani dalam menciptakan manfaat, dengan mengerahkan segenap daya mampu manusia, modal, organisasi, dan sekaligus menjamin kelangsungan hidup anggota koperasi dan petani. Dengan perkataan lain, pembinaan petani yang terintegrasi dalam pola pembinaan koperasi dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk mewujudkan koperasi mandiri, tangguh dan produktivitasnya terus meningkat, sehingga memperbaiki kesejahteraan hidup anggotanya dan meningkatkan lapangan kerja.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan juga harus mampu memberikan perlindungan yang jelas terhadap masyarakat. Upaya perlindungan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang akibat berlakunya mekanisme pasar dan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Dalam hal ini, tampaknya sulit diterapkan mekanisme pasar. Masyarakat desa jelas akan kalah bersaing. Mereka tidak punya apa-apa selain tenaga-tenaga yang pada umumnya kurang terlatih. Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, sektor pertanian harus menjadi sasaran utama. Sektor ini harus dijadikan pijakan yang kokoh sehingga di pedesaan bisa tercapai swasembada berbagai produk pertanian, terutama pangan, sebelum memasuki era industrialisasi. Lebih spesifik, ketahanan pangan lokal harus tercapai lebih dahulu (Muhammad Basri, 2007).

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2007b), pengembangan lembaga dana dan kredit pedesaan khususnya koperasi diharapkan dapat menciptakan iklim yang menunjang pola pembinaan masyarakat pedesaan. Strateginya diarahkan untuk, antara lain; (1) mendorong terbentuknya kelompok usaha kecil yang

terintegrasi dalam pola pembinaan koperasi dan berupaya meningkatkan pendapatan anggotanya; (2) memberikan masukan berbentuk asistensi teknik meningkatkan produktivitas nilai tambah dan efisiensi usahatani; (3) memperluas bentuk kerjasamanya, baik antar kelompok tani maupun dengan organisasi ekonomi pedesaan lainnya; (4) mendorong masyarakat pedesaan untuk berpartisipasi aktif dalam koperasi yang mengembangkan petani terpadu.

Modal dalam usahatani merupakan salah satu aspek penting dalam hubungannya dengan tingkat adopsi teknologi baru yang digunakan petani. Pendapatan usahatani yang rendah menyebabkan petani tidak dapat melakukan investasi, hampir semua hasil pendapatan yang diperoleh oleh petani dipergunakan kembali untuk modal dalam usahatani selanjutnya, setelah seperlunya digunakan untuk biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga (Almasdi Syahza, 2009).

Pada umumnya satu-satunya sumber modal bagi petani di pedesaan adalah kredit dari lembaga keuangan formal maupun non formal. Kredit secara umum dapat diartikan sebagai kepercayaan. Atas dasar kepercayaan, perseorangan atau suatu unit usaha dapat dilakukan transaksi pinjam-meminjam dengan ikatan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak tentang segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktu yang telah ditetapkan. Persyaratan kredit secara umum yang terdapat dalam perjanjian kredit antara lain yaitu : (1) Besarnya jumlah pinjaman, (2) Jangka waktu peminjaman, (3) Masa tenggang waktu pinjaman, (4) Tingkat bunga pinjaman.

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2003a), kelemahan pengembangan sektor pertanian di pedesaan, juga disebabkan karena adanya kendala dalam pemasaran produk pertanian. Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang dihadapi pada pemasaran produk pertanian meliputi, antara lain: 1) Kestinambungan produksi; 2) Kurang memadainya pasar; 3)

Panjangnya saluran pemasaran; 4) Rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) Berfluktuasinya harga; 6) Kurang tersedianya informasi pasar; 7) Kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) Rendahnya kualitas produksi; 9) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

Menurut Bungaran Saragih (2001), petani kita memerlukan kredit karena penghasilan yang kurang dapat mencukupi keperluan hidup keluarga petani dan keperluan usahatannya. Ditinjau dari tujuan dan jangka waktu pengembalian, Kredit Usahatani termasuk kredit tani jangka pendek yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf kehidupan petani.

Menurut Sudjanardi, menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa; (1) Pemberian Kredit Usahatani yang ringan perlu dilakukan untuk membantu petani melakukan inovasi-inovasi dalam usahatannya; (2) Kredit itu harus bersifat kredit dinamis yaitu mendorong petani untuk menggunakan secara produktif; (3) Kredit yang diberikan selain merupakan bantuan modal juga merupakan perangsang untuk menerima petunjuk dan bersedia berpartisipasi dalam program peningkatan produksi; (4) Kredit pertanian yang diberikan kepada petani tidak perlu hanya terbatas pada Kredit Usahatani saja tetapi juga harus mencakup kredit untuk kebutuhan rumah tangga (Almasdi Syahza, 2004).

2. Kebaharuan Penelitian

Kebaharuan dari hasil penelitian ini adalah ditemukan bentuk Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau dalam upaya memacu percepatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Supaya permodelan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pedesaan, maka diperlukan informasi potensi sumberdaya lokal yang tersedia di daerah survei. Informasi tersebut berupa potensi daerah berbasis pedesaan, antara lain; sektor pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan keparawisataan. Dari peotensi yang didapat dari daerah survei akan dilakukan analisis teknis dan sosial ekonomi untuk menentukan potensi pengembangan ekonomi pedesaan.

Hasil temuan ini berguna bagi pelaku usaha dan pemerintah sebagai pengambil keputusan sehubungan dengan usaha pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan. Diharapkan adanya perbaikan yang berakibat meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha khususnya masyarakat pedesaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Setelah penelitian ini dilakukan dapat memberikan gambaran rencana program pengetasan kemiskinan dan pemetaan potensi ekonomi lokal dalam upaya memacu perkembangan ekonomi masyarakat pedesaan di daerah Riau.

BAB III

TUJUAN DAN PENERAPAN HASIL PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau, dan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menentukan strategi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan terutama di wilayah pesisir melalui pemanfaatan potensi sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan di Propinsi Riau.
- b. Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengentasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal.
- c. Menentukan perumusan model pengembangan daerah pedesaan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Propinsi Riau.

2. Penerapan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan penyusunan program pembangunan ekonomi khususnya untuk daerah pedesaan, dan secara khusus keluaran penelitian ini adalah: 1) Penyediaan informasi tentang potensi perekonomian daerah pedesaan, antara lain menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan; 2) Penyediaan informasi tentang subsektor yang potensial pada berbagai sektor ekonomi untuk dikembangkan dalam hal perwilayahan pengembangan potensi ekonomi berbasis sumberdaya lokal di daerah pedesaan; 3) Penyediaan informasi

tentang faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan ekonomi pedesaan; 4) Tersusunnya rancangan pembangunan ekonomi dalam rangka mengetaskan kemiskinan di daerah pedesaan dan wilayah pesisir.

BAB IV

METODE PELAKSANAAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode deskriptif (*Descriptive Research*). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penyanderaan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau responden (masyarakat wilayah pesisir) pada daerah terpilih sebagai lokasi penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah Riau dengan pemilihan lokasi secara *Multistages cluster sampling* di wilayah pesisir. Daerah penelitian dilakukan pada tiga kabupaten yaitu; Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Alasan pemilihan ketiga kabupaten tersebut, antara lain: 1) Kabupaten terpilih merupakan daerah yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau; 2) Berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan desa, kabupaten tersebut merupakan daerah yang banyak mempunyai kantong-kantong kemiskinan; dan 3) Masih banyaknya potensi ekonomi, khususnya sumberdaya lokal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan.

2. Metode Penarikan Sampel

Sampel diambil dari masyarakat di daerah penelitian yang terpilih, yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Indragiri Hilir. Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Cochran (Almasdi Syahza, 2009c):

$$n = \frac{\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2}}{1 + \frac{1}{N} \left[\frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{d^2} - 1 \right]}$$

Keterangan: n adalah ukuran sampel; P merupakan proporsi masyarakat petani; sedangkan $Q = (1 - P)$ merupakan proporsi masyarakat nonpetani. N adalah ukuran populasi; Z adalah nilai deviasi normal terhadap probabilitas keyakinan yang diinginkan, dan $d =$ standar error yang diinginkan peneliti. Penelitian ini menggunakan batas probabilitas keyakinan sebesar 95 persen.

Pengambilan sampel dilakukan secara *Stratified Cluster Sampling* sehingga masing-masing daerah terpilih terdapat sampel yang mewakili. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpencaran, karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang beragam. Pada masing-masing cluster yang terpilih, diambil dua macam responden, yaitu responden yang berusaha dari sektor pertanian dan masyarakat yang berusaha diluar sektor pertanian.

Ukuran sampel pada masing-masing strata pada daerah terpilih ditentukan secara proporsi dengan rumus;

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan: n_i adalah ukuran sampel pada masing-masing strata; N_i adalah ukuran populasi pada masing-masing strata, dan N merupakan total populasi pada cluster yang terpilih.

Dari masing-masing daerah terpilih sebagai sampel, ditentukan proporsi (P) dari masing-masing kelompok sampel yaitu petani dan nonpetani. Hasil perhitungan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga dan Rumah Tangga Miskin pada Daerah Sampel

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rumah Tangga Miskin	
			KK	%
1	Indragiri Hilir	136.585	46.255	33,87
2	Bengkalis	122.676	29.485	24,03
3	Kepulauan Meranti	45.564	15.876	34,84
Jumlah		304.825	91.616	30,06

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, Propinsi Riau (2010)

Tingkat keyakinan pada penelitian ini adalah 95 % ($\alpha = 5 \%$), dan diasumsikan datanya berdistribusi normal, sehingga diperoleh nilai z sebesar 1,96. Dengan menggunakan rumus Cochran, maka diperoleh ukuran sampelnya sebesar 341 responden.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer yang diperlukan mencakup: identitas sampel, pemilikan dan penguasaan lahan, pendapatan rumah tangga, jenis usaha, diversifikasi usaha, peluang usaha, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Untuk melengkapi informasi yang diinginkan, diwawancarai tokoh masyarakat yang terdapat di daerah lokasi penelitian. Data juga didukung oleh informasi potensi sumberdaya lokal yang mempunyai nilai ekonomi dan berpeluang untuk dikembangkan.

Data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait mencakup kependudukan, investasi pemerintah maupun swasta, tenaga kerja, PDRB, data pemilikan lahan.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan penelitian. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (assesment) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal.

Untuk mengurangi penyimpangan (bias) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan analisis pendahuluan. Kalau ditemui kekeliruan data dari

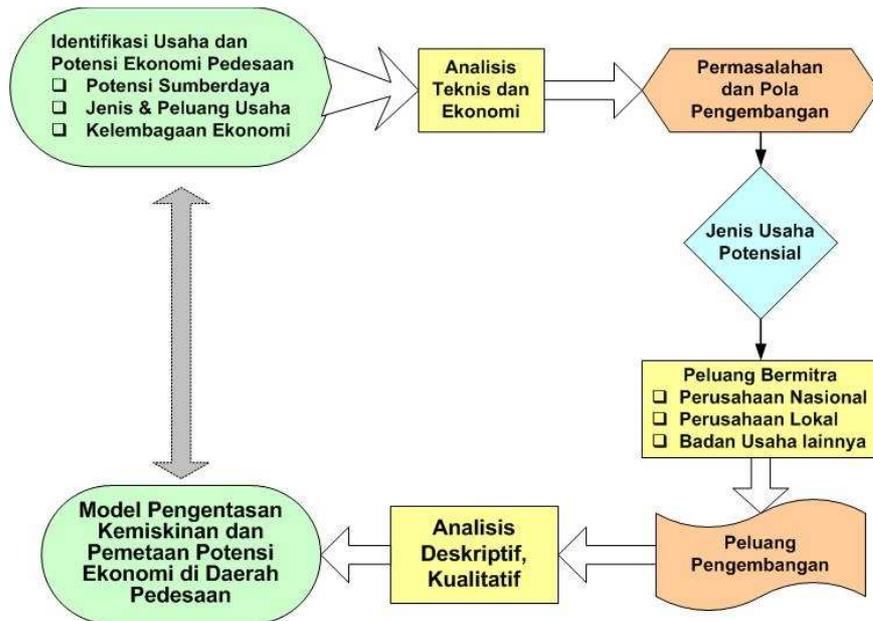
yang diharapkan karena disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga didapatkan informasi yang lebih lengkap.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Setelah data disajikan dalam tabel, dilanjutkan dengan penganalisisan.

Informasi pada penelitian ini banyak menggunakan data primer, antara lain: 1) data dari birokrasi pedesaan dan pemuka masyarakat berupa potensi sumberdaya yang ada, bentuk perekonomian masyarakat, komoditas unggulan dan penunjang di pedesaan, kebiasaan masyarakat dalam berusaha, diversifikasi usaha, dan pemilikan faktor produksi oleh masyarakat; 2) data dari masyarakat berupa kegiatan ekonomi dalam upaya memperoleh pendapatan keluarga, termasuk kegiatan usahatani, pola usahatani dan penggunaan faktor produksi pertanian, produksi, harga jual, rantai pemasaran, status pemilikan dan penguasaan lahan, kontribusi pendapatan, dan tingkat kemampuan petani serta masalah-masalah yang dihadapi oleh petani; dan 3) lembaga tataniaga yang berhubungan secara langsung dengan ekonomi masyarakat.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara deskriptif terutama terhadap data kualitatif. Hasil analisis kualitatif akan menemukan bentuk model pengetasan kemiskinan dan dihasilkan dalam bentuk program dan pemetaan potensi ekonomi yang dapat mendukung program pengetasan kemiskinan di pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal.



Gambar 2. Kerangka Pendekatan untuk Mendapatkan Output Penelitian

BAB V

LUARAN PENELITIAN YANG DITARGETKAN

Penelitian Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau dilaksanakan pada 3 kabupaten yakni Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti (merupakan pemekaran dari Kabupaten bengkalis).

Tahun Pertama:

Tahun pertama (2012) penelitian difokuskan di Kabupaten Kepulauan Meranti (hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis tahun 2009). Target penelitian adalah mendapatkan informasi tentang potensi daerah pedesaan dan peluang dikembangkan usaha yang terkait dengan ekonomi berbasis kerakyatan. Dari hasil kajian diharapkan adanya suatu informasi pengembangan ekonomi pedesaan di wilayah pesisir yang disesuaikan dengan potensi lokal, dengan indikator:

1. Teridentifikasi potensi ekonomi berbasis sumberdaya lokal di daerah pedesaan.
2. Mengadakan evaluasi sistem pelaksanaan usaha ekonomi masyarakat di daerah pedesaan berupa jenis usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
3. Menganalisis bentuk-bentuk alternatif usaha di pedesaan dan kelayakan usaha melalui lembaga ekonomi pedesaan.

Setelah penelitian ini dilakukan diharapkan dapat melahirkan minimal 2 (dua) artikel ilmiah yang dimuat di jurnal terakreditasi.

1. Jurnal Ekonomi Pembangunan (terakreditasi), Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (BPPE) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (artikel sudah dikirim via email).
2. Jurnal Ekonomi Pembangunan (terakreditasi), Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

3. Hasil penelitian sebagai bahan penyempurnaan untuk buku ajar sebelumnya (Ekonomi Pembangunan), terutama yang berkaitan dengan pengetasan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi pedesaan.

Tahun Kedua:

Pada tahun Ketiga (2013) dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian diharapkan tersusun rencana strategis pengetasan kemiskinan melalui program dan pemetaan potensi ekonomi masyarakat pedesaan wilayah pesisir. Indikator hasil penelitian, antara lain:

1. Menentukan potensi perekonomian daerah, yang menyangkut struktur ekonomi, potensi sumberdaya, perkembangan dan keterkaitan sektoral yang berpengaruh dalam pengetasan kemiskinan di daerah pedesaan yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Menentukan startegi percepatan pembangunan ekonomi masyarakat melalui pengembangan model dan pemetaan potensi ekonomi pedesaan dalam upaya pengetasan kemiskinan.

Hasil penelitian pada tahun kedua akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi, yaitu:

1. Jurnal Trikonomika (terakreditasi), Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan, Bandung.
2. Jurnal Ekonomi Pembangunan (terakreditasi), Balai Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (BPPE) Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Jurnal Pembangunan Pedesaan (terakreditasi), Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
4. Diharapkan penelitian Hibah Kompetensi ini dapat menghasilkan sebuah buku tentang Ekonomi Pedesaan.

Pada tahun kedua penelitian akan menghasilkan Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau. Hasil penelitian ini dapat Sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan dan dapat dijadikan acuan utama bagi dinas/instansi di Kabupaten/kota dalam menyusun program-program pembangunan jangka panjang dan menengah untuk pengembangan ekonomi di pedesaan khususnya wilayah pesisir.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan (TNP2K, 2012). Apabila dikaitkan dengan kondisi kemiskinan salah satu kabupaten di Propinsi Riau yang tingkat kemiskinannya termasuk tinggi adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan kabupaten yang tingkat kemiskinannya sangat tinggi. Dari data yang ada diperoleh informasi jumlah



rumah tangga miskin sebanyak 25.863 rumah tangga (RT) yang terdiri dari 114.496 jiwa. Jumlah anak yang bersekolah sebanyak 23.461 anak (berdasarkan Usia 7 s/d 18 th) dan jumlah anak tidak sekolah 7.474 anak. Dari

sisi perkerjaan sebanyak 49.070 jiwa bekerja (usia produktif L/P), tidak bekerja (pada usia produktif L/P) sebanyak 23.621 jiwa.

Terkait dengan lapangan usaha, jumlah kepala rumah tangga yang bekerja 23.322 KRT (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya). Jumlah individu yang



berkerja 48.753 (terbagi dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri pengolahan, pertambangan, bangunan, perdagangan, jasa, dan lain sebagainya).

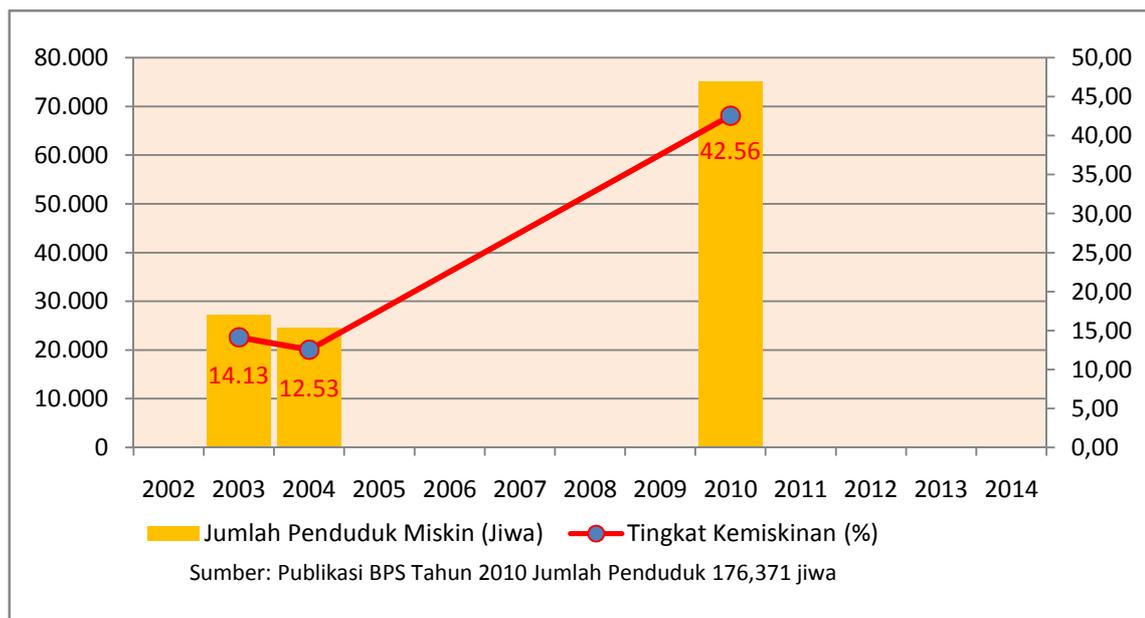
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaen Kepulauan Meranti termasuk agak rumit bila dibandingkan dengan pembangunan ekonomi daerah lain di Propinsi Riau. Kondisi ini disebabkan karena adanya kendala yang dihadapi di daerah, antara lain: 1) kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau; 2) angka kemiskinan masih relatif tinggi; 3) terbatasnya infrastruktur; 4) rendahnya kualitas SDM; dan 5) degradasi lingkungan hidup.

6.1 Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Sebagai kabupaten yang baru dimekarkan masih banyak tugas pemerintah daerah untuk membangun kabupaten tersebut, terutama untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Faktor utama yang dihapapi oleh pemerintah daerah yang baru mekar terutama Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sumber dana untuk pembangunan. Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk daerah yang sumber pendapatan daerahnya (PAD) termasuk rendah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kendala dalam pembangunan terutama memacu pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti diperlukan anggaran pembangunan terutama untuk membangun infrastruktur seoerti jalan, jembatan dan pelabuhan.

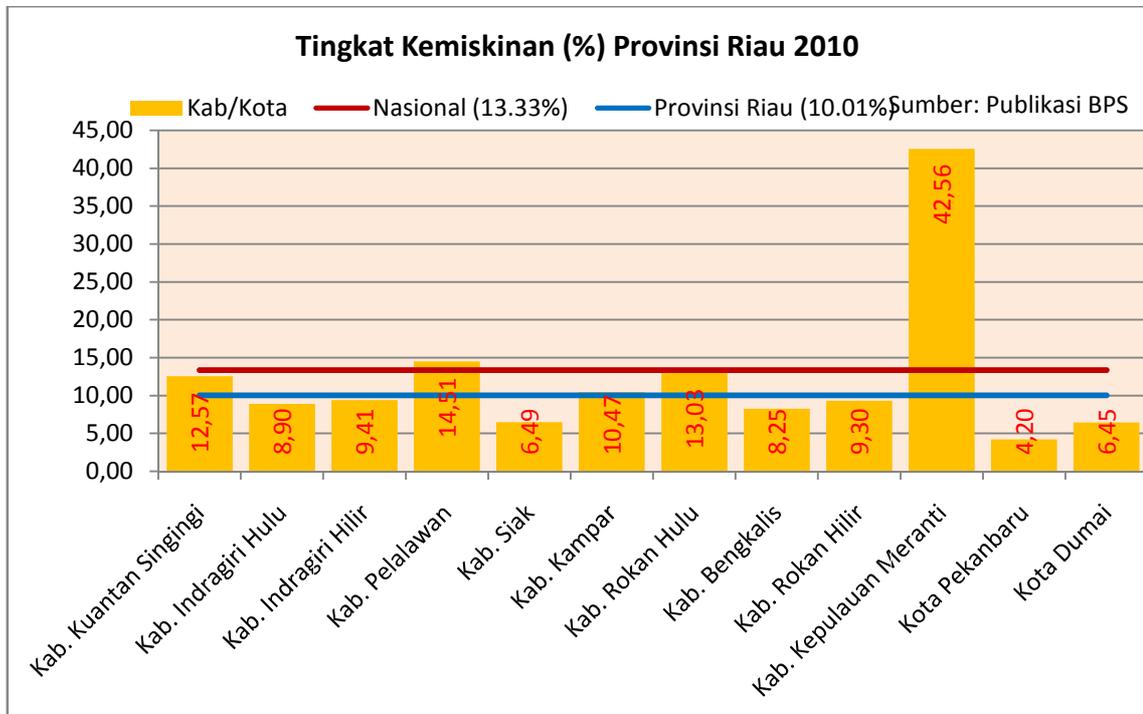
Sesuai dengan kondisi daerahnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang berada di wilayah pesisir Propinsi Riau. Faktor geografi tersebut menjadi kesulitan utama dalam pembangunan, karena membutuhkan dana yang besar untuk membangun infrastruktur. Berdasarkan hasil kajian di lapangan, dapat diketahui dan diidentifikasi angka kemiskinan serta permasalahan pembanguana di Kabupaten Kepulauan Meranti. Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (42,5%), atau 75.000 jiwa; 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

Pada Gambar 1 disajikan keadaan penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tahun 2010 terdapat penduduk miskin sebesar 42,56%.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2002-2010

Gambaran perbandingan kemiskinan di Daerah Riau berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) antar Kabupaten di Provinsi Riau 2010

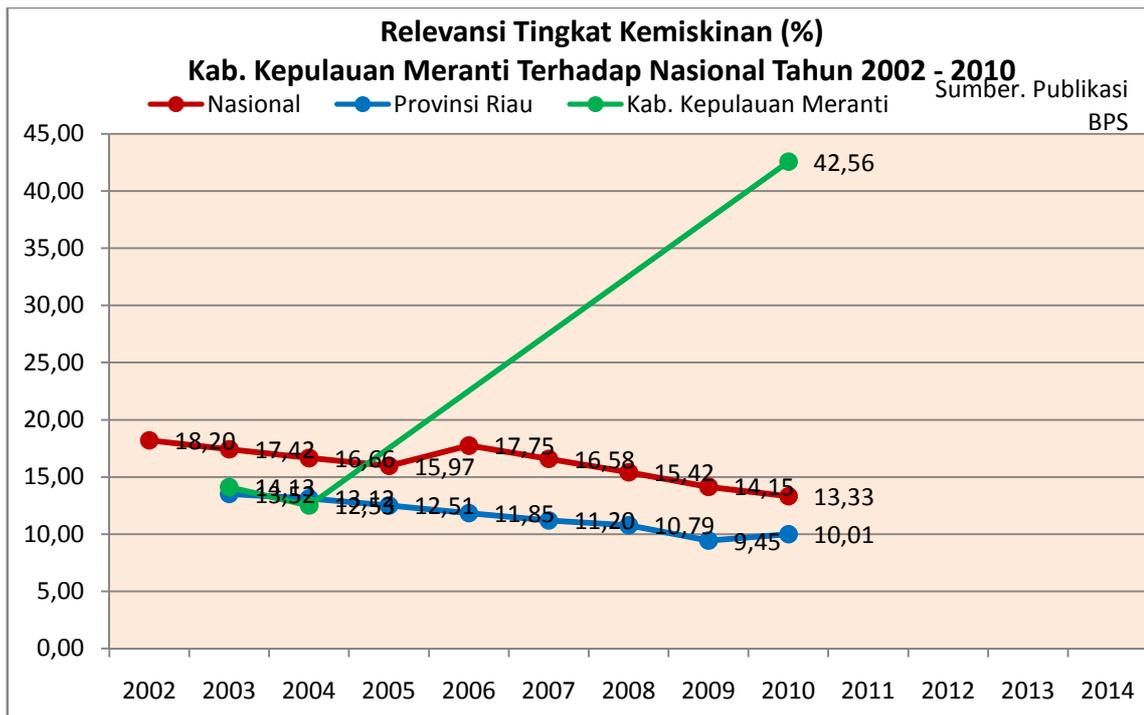
Parameter yang lazim digunakan para analis dalam menetapkan jumlah kemiskinan adalah lebih cenderung pada pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok. Seseorang dikatakan miskin manakala dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya yakni makanan, asupan kalorinya minimal 2.100 kkal/hari per kapita. Kemiskinan juga diukur dengan menambahkan parameter pemenuhan kebutuhan pokok/dasar non makanan yang meliputi pendidikan, sandang dan hal-hal lainnya. Dalam menentukan kemiskinan terdapat variabel pokok



yang tidak bisa dilupakan yakni yang terkenal dengan istilah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terbagi menjadi dua yakni garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Adapun komponen dari

masing-masing indikator adalah GKM lebih berbasis pada pendekatan pemenuhan asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Muhammad Ahmbali, 2008). Komponen GKBM adalah seperti pendidikan, kesehatan, komunikasi, rekreasi, transportasi, listrik, dan asuransi.

Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Nasional Tahun 2002-2010 disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kepulauan Meranti Terhadap Nasional Tahun 2002-2010

Untuk penanggulangi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, prioritas program pengembangan difokuskan di daerah yang berpotensi untuk dikembangkan atau kawasan andalan. Kawasan andalan Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: Pulau tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, dan Pulau Padang. Berdasarkan informasi dan hasil kajian di lapangan, di daerah yang berpotensi dikembangkan pusat pertumbuhan. Perspektif Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Di Kabupaten Kepulauan Meranti

- Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Selatpanjang dan Ransang
- Pengembangan cluster industri berbasis pertanian.

- Pengembangan kawasan pelabuhan dan industri Dorak
- Pengembangan kawasan industri Tebing Tinggi Barat
- Pengembangan kawasan industri Pulau Ransang
- Pengembangan komoditas unggulan daerah dalam rangka ketahanan pangan operasi pangan Riau makmur (OPRM)
- Pengembangan perikanan, penangkapan ikan dan budidaya ikan khususnya patin jambal dan pertambakan udang
- Pengembangan bidang peternakan khususnya ternak sapi, kambing , dan itik
- Revitalisasi perkebunan karet, kelapa, sagu, kopi dan kakao

6.2 Prinsip Utama Penanggulangan Kemiskinan Yang Komprehensif

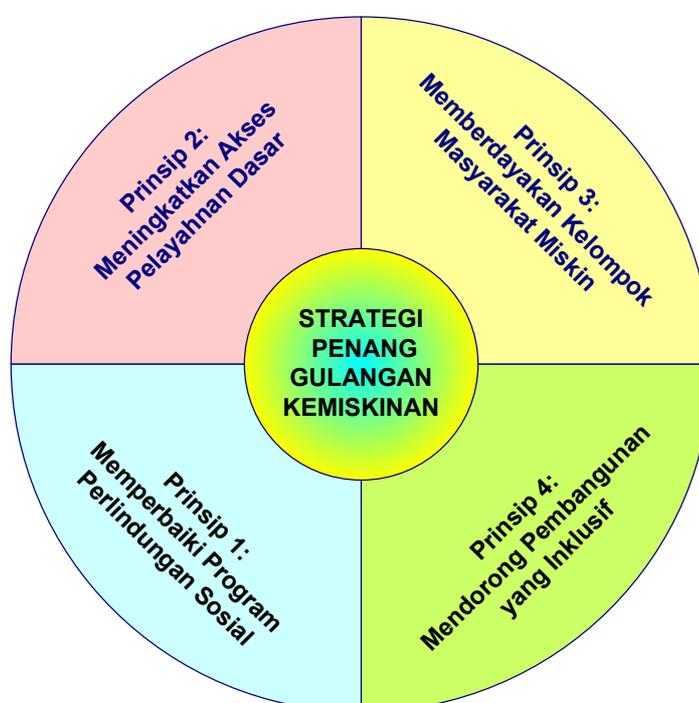
Kriteria keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti adanya penurunan jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlah keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, oleh karena itu selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan banyaknya keluarga miskin diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan sektor ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan bantuan modal usaha produktif.

Kemiskinan di daerah terbentuk pada umumnya karena alasan klasik, yakni kekurangan modal usaha, lemahnya sumberdaya manusia, kurangnya akses pasar, infrastruktur yang tidak sempurna, lemahnya informasi, lemahnya kemampuan memanfaatkan peluang



usaha. Dari sisi lain juga lemahnya pelayanan sosial untuk masyarakat terutama kesehatan dan pendidikan. Guna mengatasi masalah tersebut maka dilakukan penanggulangan kemiskinan dipedesaan. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah keluarga miskin. Strategi yang dimaksud antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesesahatan, pendidikan,

kelembagaan ekonomi dan nonekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan (TNP2K, 2012). Pada Gambar 4 disajikan strategi penurunan keluarga miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 4. Strategi Penurunan Jumlah Keluarga Miskin (TNP2K, 2012).

Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan sistem perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi guncangan-guncangan (*shocks*) dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi

agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.

Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.

Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal manusia (*human capital*).

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi



berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan kelompok masyarakat terhadap penyakit.

Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan

karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

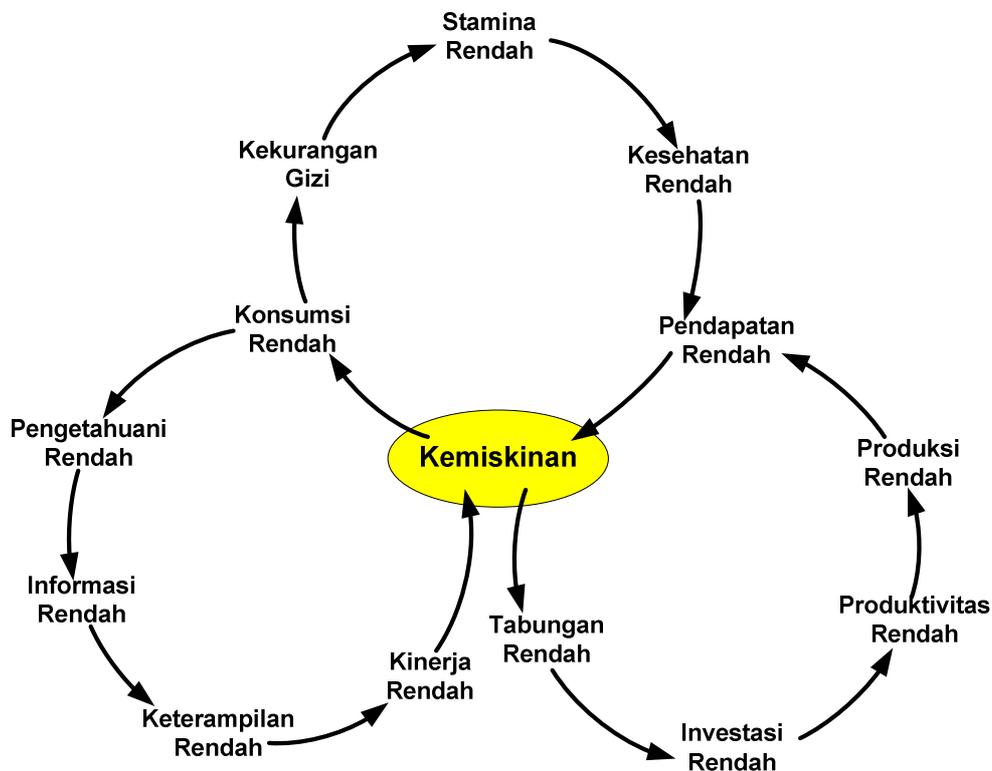
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.

Program penanggulangi kemiskinan dilaksanakan oleh pemerintah secara nasional maupun di tingkah daerah. Pemerintah telah melakukan beberapa program secara nasional maupun daerah, antara lain: 1) Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) melalui bantuan modal; 2) Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT); 3) Program dalam rangka Menanggulangi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE); 4) P2MPD; 5) PPK; 6) Program PNPM mandiri Pedesaan; 7) P2KP; 8) Program RHI (Rumah Layak Huni); 9) Program UMKM; 10) BLT (Bantuan Langsung Tunai); 11) BOS (Bantuan Operasional Sekolah); 12) Program Raskin; 13) OPRM (Operasi Pangan Riau Makmur); 14) Program pengetahuan kemiskinan, kebodohan dan pembangunan infrastruktur (K2i).



6.3 Lingkaran Kemiskinan di Pedesaan

Pemerintah selalu mengembangkan program penanggulangan kemiskinan baik secara daerah maupun secara nasional. Kemiskinan di daerah pedesaan maupun di perkotaan terbentuk secara berantai. Sebuah keluarga miskin akan sulit keluar dari kemiskinan tersebut disebabkan berapa hal, antara lain: keluarga miskin mempunyai kemampuan pengetahuan yang rendah dan berakibat kepada keterampilan yang rendah. Kondisi ini menyebabkan tingkat keahlian yang dimiliki juga rendah. Secara berkesinambungan mereka ini memperoleh pendapatan yang rendah pula. Begitu juga dari sisi kesehatan. Keluarga miskin mempunyai gizi yang tidak memadai dan menyebabkan stamina rendah yang berdampak terhadap produktivitas rendah. Akhirnya bermuara kepada pendapatan yang rendah dan menyebabkan mereka tetap miskin. Pada Gambar 5 disajikan terbentuknya kemiskinan dengan menyajikan bentuk-bentuk lingkaran kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan.



5. Linkaran Terbentuknya Kemiskinan di Pedesaan

Gambar

6.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2011-2015: 1) Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif; 2) Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil Pertanian, Perikanan dan Peternakan; 3) Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat; 4) Meningkatkan sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi local; 5) Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi; 6) Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi; 7) Meningkatkan pembinaan mental spritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 adalah: 1) Penataan birokrasi pemerintahan agar menjadi efisien dan efektif dengan didukung peningkatan kualitas aparatur yang profesional dan bermoral; 2) Meningkatkan investasi dalam rangka menunbuhkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperbaiki tingkat pendapatan masyarakat; 3) Menyediakan infrastruktur sosial dan ekonomi secara memadai untuk ketubuhan masyarakat dan mendukung kegiatan pembangunan; 4) Memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas; 5) Pengelolaan SDA secara efisien untuk menjamin kelanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan; 6) Pendayagunaan sumberdaya kelautan dan pulau-pulau kecil; 7) Mewujudkan daerah perbatasan menjadi daerah layak huni, produktif dan mandiri sehingga nantinya menjadi daerah perbatasan berfungsi sebagai halaman terdepan wilayah NKRI.

6.5 Penanggulangan Kemiskinan: Pendekatan Lintas Sektor

Terkait dengan beberapa program yang tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan antara lain dengan memfokuskan arah pembangunan untuk mencapai visi Indonesia tahun 2020 pada pengentasan kemiskinan. Fokus program tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong

pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Dari 5 fokus program pemerintah tersebut, diharapkan jumlah rakyat miskin yang ada dapat tertanggulangi sedikit demi sedikit.

Beberapa langkah teknis yang digalakkan pemerintah terkait 5 program tersebut antara lain (Kompasiana, 2012):

a. Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Fokus program ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Program yang berkaitan dengan fokus ini seperti: 1) Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton; 2) Stabilisasi/kepastian harga komoditas primer.

b. Mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin.

Fokus program ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Beberapa program yang berkenaan dengan fokus ini antara lain: 1) Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional; 2) Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP); 3) Pelatihan budaya, motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro; 4) Pembinaan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal; 5) Fasilitasi sarana dan prasarana usaha mikro; 6) Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir; 7) Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil; 8) Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga; 9) Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah; 10) Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

c. Menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Program yang berkaitan dengan fokus ketiga ini antara lain: 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di daerah perdesaan dan perkotaan; 2) Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah; 3) Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus; 4) Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

d. Meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar.

Fokus program ini bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Beberapa program yang berkaitan dengan fokus ini antara lain: 1) Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs); 2) Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA); 3) Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi; 4) Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit

e. Membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

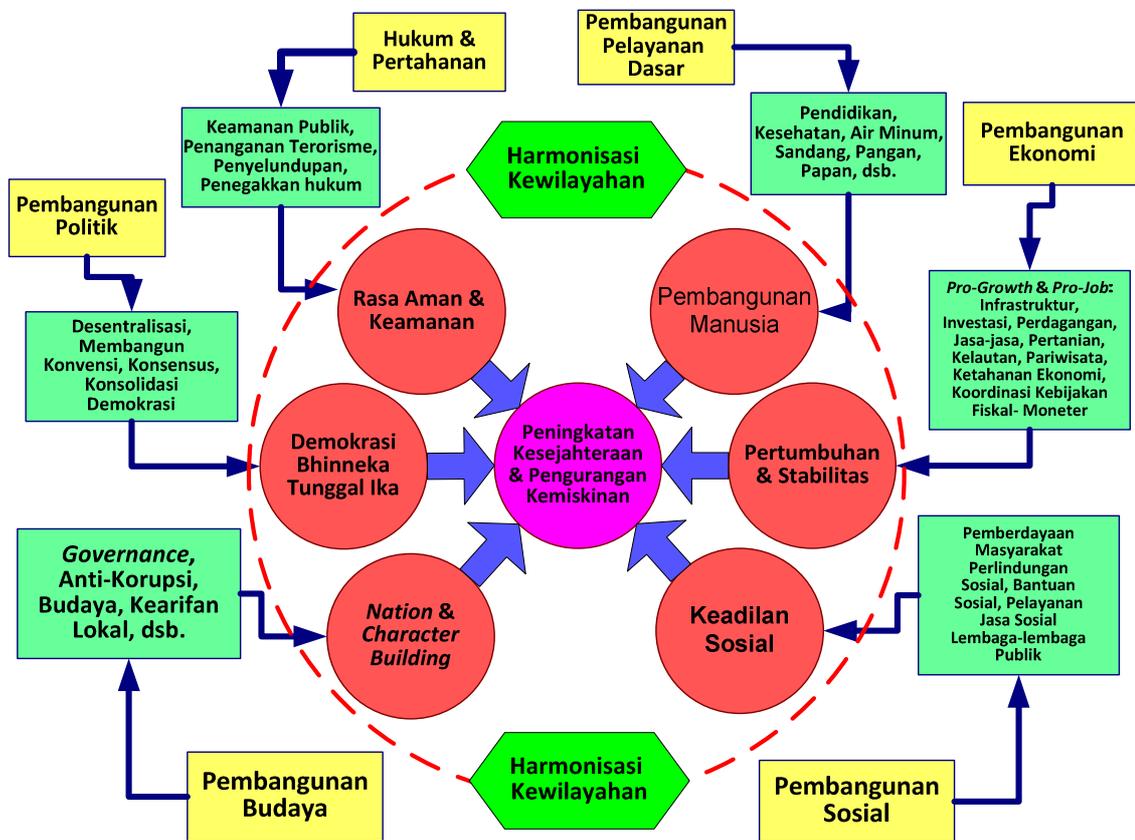
Fokus ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Program teknis yang di buat oleh pemerintah seperti : 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA); 2) Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 3) Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana social; 4) Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan

sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH); 5) Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan).

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang di hadapi oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini. Kemiskinan di pengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Faktor tersebut antara lain tingkat pendapatan, pendidikan, kesehatan, akses barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka menuju kehidupan yang lebih bermartabat. Oleh karena itu, kemiskinan wajib untuk ditanggulangi, sebab jika tidak tertanggulangi akan dapat mengganggu pembangunan nasional. Dalam konteks ini, beberapa upaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan menggerakkan sektor real melalui sektor UMKM. Beberapa kebijakan yang menyangkut sektor ini seperti program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Upaya strategis yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan UMKM antara lain, pertama, menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMKM meliputi regulasi dan perlindungan usaha. Kedua menciptakan sistem penjaminan bagi usaha mikro. Ketiga menyediakan bantuan teknis berupa pendampingan dan bantuan menejerial. Keempat memperbesar akses perkreditan pada lembaga keuangan. Dengan empat langkah tersebut, maka sektor UMKM akan lebih bergerak yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan angka kemiskinan. kemiskinan akan makin bertambah seiring tidak terjadinya pemerataan pembangunan (Kompasiana, 2012).

Terkait dengan penanggulangi penurunan jumlah keluarga miskin, pada Gambar 6 disajikan model penurunan jumlah keluarga miskin melalui pendekatan lintas sektoral. Pelaksanaan program tersebut seharusnya melibatkan semua komponen, antara lain: pemerintah pusat dan daerah, piha swasta, dan perguruan tinggi. Program penanggulangi kemiskinan bukan berarti menghabiskan orang miskin, melainkan program tersebut harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasar kelurga miskin tersebut. Bagi keluarga miskin

kebutuhan dasar terpenuhi dan kebutuhan pokok tidak memberatkan beban keluarga, maka kesejahteraan mereka akan meningkat. Untuk itu program penanggulangan kemiskinan harus berupaya untuk menciptakan lapangan kerja dan usaha sebagai sumber pendapatan bagi keluarga miskin. Secara umum keluarga miskin memang sulit untuk ditingkatkan kesejahteraannya, hal tersebut terkait dengan kepemilikan faktor produksi seperti tidak punya lahan sebagai tempat berusaha, kekurangan modal untuk mengembangkan usaha, tidak punya keahlian dalam berusaha, dan keluarga miskin hanya memiliki sumberdaya manusia yang kualitasnya rendah atau hanya sebatas temaga kerja tidak terdidik.



Gambar 6. Model Penurunan Jumlah Keluarga Miskin Melalui Pendekatan Lintas Sektor

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Angka Kemiskinan dan Issue Pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, antara lain: 1) angka kemiskinan relatif tinggi (56,76%); 2) infrastruktur dasar belum memadai (rumah tidak layak huni, jalan, abrasi, air bersih, banjir, pelabuhan, listrik); 3) masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, (masih banyak anak usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan); 4) fasilitas serta sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas; 5) angka kematian ibu dan bayi yang relatif masih tinggi (sarana dan prasarana Kesehatan masih belum memadai); 6) penangkapan ikan masih menggunakan alat tradisional; 7) perkebunan karet milik masyarakat yang sudah tua, sehingga diperlukan proses revitalisasi untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan.

7.2 Rekomendasi

Perlu dilakukan upaya untuk mengurangi jumlah keluarga miskin, strategi yang harus dilakukab, antara lain: 1) memperbaiki program perlindungan sosial, terutama kesesahatan, pendidikan, kelembagaan ekonomi dan nonekonomi di pedesaan; 2) meningkatkan akses pelayan dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bagi anak usia sekolah, mengurangi tingkat anak putus sekolah, memberikan harga yang layak terhadap kebutuhan pokok masyarakat miskin; 3) pemberdayaan kelompok masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, membuka peluang kerja dan usaha; 4) mendorong pembangunan yang inklusif di daerah pedesaan

Penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan melalui pendekatan lintas sector. Program tersebut meliputi 5 hal antara lain: 1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; 2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; 3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; 4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan 5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

PUSTAKA ACUAN

- Almasdi Syahza., 2003a. Paradigma Baru: Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/01/Juli/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2003b. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung
- ., 2005. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Multiplier Effect Ekonomi Pedesaan di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2007a. *Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2008. *Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau*, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009a. *Perumusan Model Pengetasan Kemiskinan Melalui Pemetaan Kelembagaan Ekonomi Berbasis Agribisnis di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau*, Penelitian Strategis Nasional DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009b. *Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun I, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2009c. *Metodologi Penelitian*, Pusbangdik Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2010a. *Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun II, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2010b. Aspek Ekonomi dan Sosial Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam *Tabloit Inspirasi*, Vol 1 No 11, 10 Juli 2010, Jakarta.

- ., 2010c. Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis di Daerah Pedesaan, *Jurnal Ekonomi*, Th.XV/02/Juli/2010, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2011a. *Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di daerah Riau*, Penelitian Hibah Kompetensi Tahun III, DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2011b, Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau (Tahun I), Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2011c, Model Pengembangan Kredit Usaha Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2011d, Studi Potensi Pengembangan Masyarakat Desa Tertinggal Kawasan Pesisir di Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru.
- ., 2011d, Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Perkebunan, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 12, No 2, Desember 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- ., 2012a, Perumusan Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Program dan Pemetaan Potensi Ekonomi Bagi Masyarakat Wilayah Pesisir di Propinsi Riau (Penelitian Fundamental Tahun I), DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2012b, Pemberdayaan Ekonomi Daerah Melalui Penataan Kelembagaan dan Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit (Penelitian MP3EI), DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- ., 2012c, Model Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau (Tahun II), Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru. Tahun 2012.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa, 2010, Ringkasan Laporan Kegiatan, Program Pemberdayaan Desa Propinsi Riau, Pekanbaru.
- Haryono Suyono. 2007. *Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat*. (Online). <http://www.hupelita.com/baca.php?id=27511>, diakses pada 31 Maret 2011.
- Kompasiana, 2012., Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Kemiskinan, <http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/>, diakses 18 Oktober 2012.

- Muhibbullah Azfa Manik. 2005. *Strategi Pemberdayaan Industri Kecil Berbasis Agroindustri di Pedesaan*. (On-line). <http://www.bung-hatta.info/content.php?article.91>. Diakses 31 Maret 2011.
- Muhammad Basri, 2007., *Desa dan Kemiskinannya*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/30/Jabar/11719.htm>, diakses 31 Maret 2011.
- Muhammad Hambali, 2008., Upaya Penanggulangan Kemiskinan, <http://marx83.wordpress.com/2008/07/05>, diakses 18 Oktober 2012
- Setiadi Wijaya, N.H., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Usahawan Indonesia*, NO. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- Saeful Bachrein., 2006. *Penetapan Komoditas Unggulan Propinsi*. (On-line). http://bp2tp.litbang.deptan.go.id/file/wp04_06_sinkom.pdf. Diakses 5 April 2011.
- TNP2K, 2012., Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), <http://tnp2k.go.id/>, diakses 18 Oktober 2012.
- Todaro, Michael P., 2006. *Pembangunan Ekonomi*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi kesembilan, Erlangga, Jakarta.
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROPINSI RIAU¹

*The strategy of disadvantaged areas development in effort of acceleration
of rural economic development in Regency of Kepulauan Meranti Province
of Riau*

Almasdi Syahza², Suarman³

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru. 28293

Email: asyahza@yahoo.co.id;

Website/blog: <http://almasdi.staff.unri.ac.id>

Abstrak

Pelaksanaan pembangunan, khususnya di wilayah pesisir di Propinsi Riau belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang. Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Propinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten tersebut memiliki 73 desa. Sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin, jumlah penduduk miskin sebesar 42,5%. Strategi pengembangan desa tertinggal di Kabupaten Bengkalis adalah pembangunan sektor pertanian berbasis agribisnis, karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan); 2). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan); 3). Pembangunan Infrastruktur.

Kata kunci: desa tertinggal, kemiskinan, ekonomi pedesaan

Abstract

The implementation of development, especially in coastal areas of Riau Province, has not been able to improve the welfare of the people especially those living in rural areas. The disparity between rural and urban areas caused by bias and distortion of the development which more pro to urban economy. It causes disadvantaged areas that poor and underdeveloped. One of the

¹ Hasil penelitian Fundamental tahun 2012, DP2M Dikti, Jakarta

² Staf Pengajar dan Peneliti Senior Ekonomi Pedesaan, Lembaga Penelitian Universitas Riau

³ Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Riau

regencies that had imbalance and more lagging areas in the Province of Riau is the Regency of Kepulauan Meranti. The district has 73 villages. A total of 59 villages (80.82%) are disadvantaged villages. The number of households as much as 45,564, amounting to 34.84% (15,876) are poor households, number of poor people by 42.5%. The strategy of disadvantaged areas development in Regency of Kepulauan Meranti is the development of agriculture sector based on agribusiness, because most of its population are farmers and fishermen. In the effort to spur the development from economic and social aspects in disadvantaged areas, then the program of rural development should prioritize the three main aspects, those are: 1) Improvement of People's Economy (Eradicate Poverty); 2) Improving the Quality of Human Resources (Alleviation of Ignorance); 3) Infrastructure Development.

Key words: *disadvantaged village, poverty, rural economy*

Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di daerah Riau, khususnya di wilayah pesisir belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berdiam di daerah pedesaan. Terjadinya kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan disebabkan karena bias dan distorsi pembangunan yang lebih banyak berpihak kepada ekonomi perkotaan. Akibatnya timbul daerah-daerah tertinggal yang miskin dan terkebelakang.

Salah satu kabupaten yang merasakan ketimpangan dan banyaknya daerah tertinggal di Propinsi Riau adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kabupaten tersebut merupakan pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki 5 (lima) kecamatan dengan luas daerah 3.707.84 km². Jumlah penduduk sebanyak 216.329 jiwa.

Kabupaten Kepulauan Meranti juga berdekatan dengan pengembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 dan bahagian yang tidak terpisahkan dari *Free Trade Zone* Batam, Bintan dan Karimun (FTZ-BBK). Batam sebagai *Free Trade Zone* (FTZ) yang sebelumnya telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), berubah menjadi suatu usaha untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang

bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional yang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu (Zainal, 2010).

Kedudukan strategis Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdekatan dengan Batam sebagai FTZ terhadap Singapura akan memberikan berbagai peluang pengembangan kawasan *hinterland* Batam, melalui penetapan peran sinergis terhadap pengembangan aktifitas ekonomi dan sosial, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kawasan hinterland Batam (dalam hal ini wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti) dapat memainkan peranannya sebagai *extension activity and buffer area*. Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu *hinterland* Batam dapat menjadi *key success factor dan stimulator* bagi penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Batam Bintan dan Karimum (KEK-BBK). Disamping itu dapat pula mentransformasi diri agar memiliki daya saing dalam menangkap berbagai peluang ekonomi KEK-BBK. Pengembangan kawasan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mendukung KEK-BBK harus dicermati sejak dini agar berbagai konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti benar-benar fokus dan terstruktur dengan baik.

Dalam upaya menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai *hinterland* KEK Batam, diperlukan arah pengembangan antara lain memperkuat fungsi Kabupaten Kepulauan Meranti di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, infra struktur, peningkatan sumber daya manusia tempatan, pariwisata, yang kesemuanya itu tentunya haruslah sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Meranti itu sendiri.

Setiap pusat pertumbuhan ekonomi akan mempunyai daerah penarikan dan daerah penolakan sampai batas tertentu, sehingga dalam suatu wilayah yang luas akan terbentuk gugusan-gugusan pusat pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pengaruhnya (*hinterland*) masing-masing. Dalam ilmu ekonomi regional teori pusat pertumbuhan ekonomi dinyatakan sebagai salah satu instrumen pembangunan wilayah yang cukup baik karena dapat menimbulkan

beraneka efek atau dampak yang positif terhadap pembangunan wilayah yang ada disekitarnya (Richardson, 2001). Pusat pertumbuhan ekonomi akan menimbulkan efek tetesan ke bawah (*trickling down effect* atau *spread effect*) dan efek polarisasi (*polarization effect* atau *backwash effect*) pada wilayah yang ada disekitarnya (*hinterland*). Pendapatan wilayah akan lebih besar jika investasi pembangunan dikonsentrasikan pada pusat pertumbuhan dibandingkan jika investasi pembangunan yang sama digunakan secara menyebar dalam seluruh wilayah yang bersangkutan.

Tantangan yang dihadapi oleh daerah otonom yang baru khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan dengan kendala ketersediaan sumberdaya di daerah. Dengan demikian penentuan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang tepat sangat diperlukan. Arah penentuan kebijakan strategi tersebut adalah tercapainya kriteria-kriteria prioritas pembangunan berupa penurunan bentuk-bentuk ketimpangan, kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan pembangunan yang mampu meningkatkan pertumbuhan daerah. Sedangkan harapan dari pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri adalah terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat. Dalam kaitan tersebut, salah satu langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat dan terarah (Syamsuar, 2010)

Berdasarkan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Tabel 1) di daerah tersebut terdapat 73 desa. Sebagian besar dari desa yang ada yakni sebanyak 59 desa (80,82%) merupakan desa tertinggal. Jumlah rumah tangga sebanyak 45.564 KK, dan sebesar 34,84% (15.876 KK) merupakan rumah tangga miskin. Banyaknya desa tertinggal dan keluarga prasejahtera di daerah ini merupakan indikasi bahwa pembangunan ekonomi selama ini (semasa bergabung dengan kabupaten induk) belum menyentuh rakyat lapisan bawah sehingga dengan adanya krisis menyebabkan daerah-daerah pedesaan yang terpencil menjadi rentan sehingga terpuruk menjadi daerah miskin. Hal ini disebabkan selain oleh karena kebijaksanaan yang salah dan distortif pada masa lalu juga karena kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan wilayah pesisir.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga, Desa, Rumah Tangga Miskin, dan Desa Tertinggal di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2009

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Jumlah Desa	Rumah tangga Miskin		Desa Tertinggal	
				Miskin	%	Desa	%
1	Tebing Tinggi	17.745	16	4.953	27,91	10	62,50
2	Tebing Tinggi Barat	3.585	8	1.598	44,57	6	75,00
3	Rangsang	6.729	13	2.843	42,25	11	84,62
4	Rangsang Barat	6.608	15	2.307	34,91	14	93,33
5	Merbau	10.897	21	4.175	38,31	18	85,71
Jumlah		45.564	73	15.876	34,84	59	80,82

Catatan: Data sebelum pemekaran kecamatan

Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, 2010.

Tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah otonom baru adalah peningkatan pembangunan daerah dan kemandirian dalam pembangunan tersebut. Pelaksana kebijakan di daerah harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang merata dan berimbang di setiap kecamatan. Dengan kondisi dan potensi yang ada, maka diperlukan suatu kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan percepatan ekonomi di Kabupaten kepulauan Meranti dengan tingkat kesejangan yang minimal.

Posisi Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat menguntungkan dari segi *hinterland* KEK Batam, maka ketimpangan dan kesenjangan ekonomi di daerah dapat di kurangi dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan potensi yang ada. Salah satu cara untuk mengatasi kesenjangan ini adalah dengan program pembangunan ekonomi untuk memberdayakan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan maka program pembangunan ekonomi yang cocok adalah pembangunan ekonomi yang berbasis sumberdaya pertanian pedesaan dan tidak membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi. Program ini dapat berbentuk pembangunan pertanian tanaman perkebunan, tanaman makanan dan hortikultura serta perikanan.

Apabila diamati pembangunan di Daerah Riau yang terjadi selama ini, adalah *polarization effect*, seperti terjadinya urbanisasi oleh tenaga kerja

pedesaan, pemusatan industri pengolahan di daerah perkotaan. Sementara *spread effect* serta *striking down effect* yang diharapkan malah tidak terjadi, seperti tidak berminatnya investor melakukan investasi di daerah pedesaan (sumber bahan baku). Akibat yang dirasakan adalah daerah yang sudah berkembang semakin berkembang dan di daerah tersebut akan terjadi penumpukan kegiatan industri, sementara daerah-daerah lain semakin tertinggal dan kurang diminati oleh investor (Syahza, 2007a).

Menurut Syahza (2007b), pembangunan pedesaan harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan sifat dan cirinya. Pembangunan pedesaan harus mengikuti empat upaya besar, satu sama lain saling berkaitan dan merupakan strategi pokok pembangunan pedesaan, yaitu: *Pertama*, memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Dalam upaya ini diperlukan masukan modal dan bimbingan-bimbingan pemanfaatan teknologi dan pemasaran untuk memampukan dan memandirikan masyarakat desa; *Kedua*, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan agar memiliki dasar yang memadai untuk meningkatkan dan memperkuat produktivitas dan daya saing; *Ketiga*, pembangunan prasarana di pedesaan. Untuk daerah pedesaan prasarana perhubungan merupakan kebutuhan yang mutlak, karena prasarana perhubungan akan memacu ketertinggalan masyarakat pedesaan; dan *keempat*, membangun kelembagaan pedesaan baik yang bersifat formal maupun nonformal. Kelembagaan yang dibutuhkan oleh pedesaan adalah terciptanya pelayanan yang baik terutama untuk memacu perekonomian pedesaan seperti lembaga keuangan.

Dari sisi lain tentang penyebab kesenjangan ekonomi menurut **Alim (2007) menilai** di dalam negeri kebijakan-kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan pemodal industri di kota-kota ketimbang rakyat pedesaan. Di tingkat desa, pemerintah lebih banyak menerapkan kebijakan yang menguntungkan sebagian kecil elit desa daripada sebagian besar buruh tani. Contohnya adalah proyek intensifikasi pertanian yang menghasilkan hasil tani melimpah. Teknologi dan tatacara bertani dimoderenkan. Petani bisa panen dua-tiga kali setahun. Banyak petani *naek* haji. Ilmuwan menyebutnya revolusi hijau.

Dari uraian yang dikemukakan, maka penelitian ini diharapkan dapat menemukan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya membangun kabupaten yang mandiri.

Berkaitan dengan penelitian ini, beberapa pertanyaan berikut dapat dijadikan acuan dalam menyusun perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau, yaitu: 1) Kendala apa yang dihadapi dalam pengembangan potensi ekonomi di pedesaan; 2) Bagaimanakah perumusan model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menyusun rencana strategis model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui survey dengan metode perkembangan (*Developmental Research*). Guna mendapatkan informasi secara umum tentang keadaan daerah-daerah yang potensial untuk dikembangkan, maka penelitian ini banyak memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui survey. Data sekunder hanya bersifat sebagai pendukung.

Studi ini dilakukan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau dengan pemilihan lokasi dilakukan secara *cluster* di daerah pedesaan dengan pertimbangan jumlah desa tertinggal, keluarga miskin dan jumlah penduduk per kecamatan. Untuk setiap lokasi desa yang terpilih, pengambilan sampel masyarakat miskin digunakan teknik pengumpulan data dengan metode *purposive sampling*. Metode ini digunakan dengan pertimbangan bahwa letak lokasi penelitian yang berpecahan, karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian yang beragam, dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui kuesioner dan wawancara secara mendalam.

Variabel yang diukur dalam studi ini adalah variabel yang diperlukan untuk pembangunan desa tertinggal yang meliputi kelayakan teknis dan kelayakan berkembang di masa depan. Untuk mengetahui kedua kelayakan tersebut maka diperlukan data-data yang dapat memberikan informasi dalam studi ini, antara lain: 1) Data wilayah yang mempunyai indikasi potensial untuk pengembangan dan rencana lintas sektoral; 2) Data Ekonomi Wilayah; dan 3) Data Sosial dan Kependudukan.

Penelitian ini memerlukan data primer. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Rapid Rural Appraisal* (RRA), yaitu suatu pendekatan partisipatif untuk mendapatkan data/informasi dan penilaian (*assessment*) secara umum di lapangan dalam waktu yang relatif pendek. Kelebihan pendekatan ini adalah penelitian bisa mencakup daerah yang lebih luas dalam waktu relatif singkat untuk mendapatkan informasi yang luas secara umum. Pengumpulan informasi dan data dilakukan secara fleksibel, tidak terikat secara kaku dengan kuesioner. Dalam metode RRA ini informasi yang dikumpulkan terbatas pada informasi dan yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, namun dilakukan dengan lebih mendalam dengan menelusuri sumber informasi sehingga didapatkan informasi yang lengkap tentang sesuatu hal. Kuesioner berperan sebagai pedoman umum untuk mengingatkan peneliti agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.

Kekhususan lain dari RRA ini adalah survey pengumpulan informasi dilakukan oleh peneliti yang multidisipliner atau peneliti yang mampu melihat masalah secara multidisipliner. Untuk mengurangi penyimpangan (*bias*) yang disebabkan oleh unsur subjektif peneliti maka setiap kali selesai melakukan interview dengan responden dilakukan diskusi diantara peneliti, saling tukar informasi tentang suatu masalah tertentu. Kalau ditemui perbedaan pandangan dalam suatu masalah yang disebabkan oleh adanya informasi yang keliru atau salah interpretasi maka dilakukan konfirmasi terhadap sumber informasi atau dicari informasi tambahan sehingga akan didapatkan persepsi yang sama diantara peneliti.

Data yang telah dikumpulkan dilanjutkan dengan pentabulasian sesuai dengan kebutuhan studi kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan secara deskriptif. Di samping itu juga dilakukan analisis kuantitatif melalui pendekatan

konsep pengembangan tata ruang wilayah ditinjau dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, kebijakan pemerintah, daya dukung lahan, serta sosial budaya masyarakat.

Penelitian ini merupakan kajian menemukan Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sasaran yang hendak dicapai adalah memacu pertumbuhan dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan sasaran peningkatan taraf hidup masyarakat desa tertinggal. Untuk itu perlu diinventarisir sumberdaya yang berpotensi untuk dikembangkan dari sisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat tempatan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui pendekatan konsep ekonomi kerakyatan dari berbagai aspek, serta disesuaikan dengan keadaan fisik, ekonomi, dan kebijakan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Karena sebagian besar di daerah pedesaan rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pedesaan dengan lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan kedepan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia.

Pengembangan sektor pertanian di pedesaan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Ketimpangan pembangunan pada masa

lalu lebih memihak kepada sektor ekonomi perkotaan yaitu industri dan jasa, sementara ekonomi pedesaan yakni pertanian terabaikan. Tidak bisa dipungkiri, sejak krisis ekonomi tahun 1998 sektor pertanian memperlihatkan perubahan ekonomi di pedesaan menjadi lebih baik karena ditopang oleh komoditi yang berorientasi ekspor.

Pembangunan ke depan tidak bisa meremehkan pembangunan pedesaan melalui pengembangan sektor pertanian. Hal tersebut disebabkan sektor pertanian mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: 1) Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah, ini merupakan peluang pasar yang baik bagi pelaku agribisnis; 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi). Keragaman produk menuntut adanya pengolahan hasil (agroindustri); dan 3) Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.

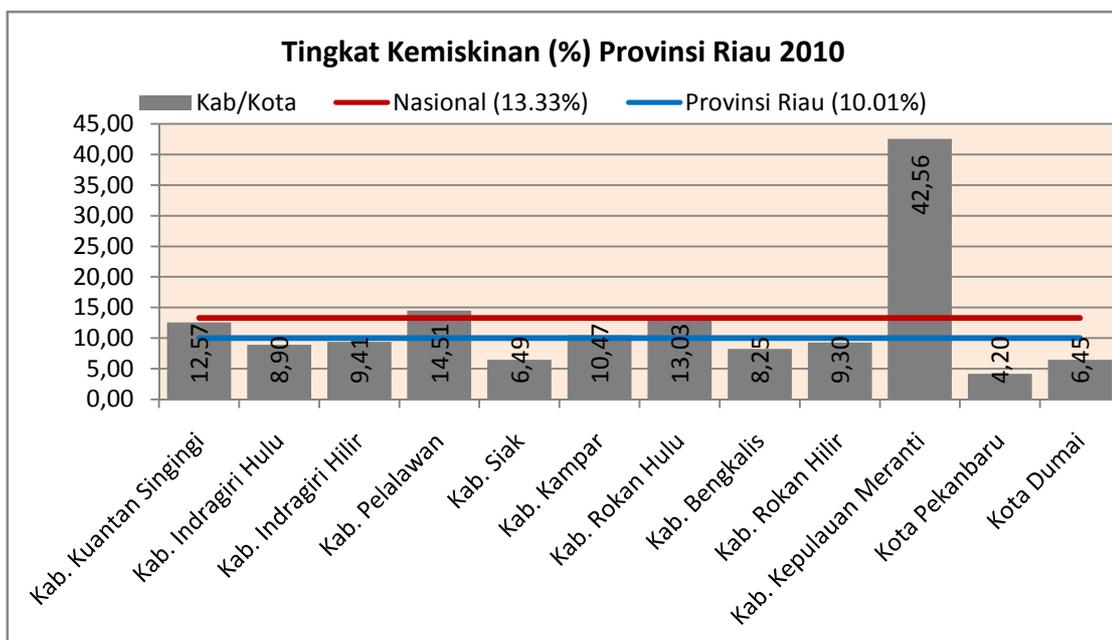
Harapan masa depan sektor pertanian tersebut tidak bisa diraih dengan begitu mudahnya. Keberhasilan sektor pertanian juga tidak lepas dari peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan agribisnis sebagai investasi dan penggerak pasar, dan partisipasi masyarakat tani untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produknya. Selain dari ketiga komponen tersebut, di lapangan ditemukan kendala yang dihadapi oleh pelaku usahatani berupa adanya mafia pemasaran produk pertanian. Apakah produk usahatani skala kecil maupun skala besar. Pada skala kecil di pedesaan ditemukan mafia pemasaran hasil pertanian yang dilakukan oleh pedagang pengumpul (istilah pedesaan toke) tingkat desa maupun di tingkat kecamatan. Mereka ini mempunyai kekuatan untuk mengendalikan harga di tingkat petani dengan berbagai dalih/alasan. Sementara di tingkat skala besar bentuk mafia pemasaran lebih penekanan kepada kekuatan modal dan kekuasaan pasar dan kartel produk pertanian.

1. Gambaran Daerah dan Kondisi Penduduk di Lokasi Penelitian

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas 369.807 Ha (daratan), 320.606 Ha (laut). Total luas wilayah 680.413 Ha. Batas wilayah

administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti: sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis dan Selat Malaka; sebelah Selatan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan; sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun (Provinsi Kepulauan Riau); sebelah Barat dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kepulauan Meranti (setelah pemekaran) terdiri dari 7 Kecamatan dengan 73 desa dan kelurahan yang berada di 4 pulau utama (Pulau Padang, Merbau, Rangsang dan Tebing Tinggi). Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010 berjumlah 230.007,7 jiwa dengan kepadatan rata-rata sekitar 64 jiwa/Ha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (2010), tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 42,5%. Kemiskinan ini diatas kemiskinan tingkat propinsi Riau, bahkan sangat tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional yakni sebesar 13,13%. Perbandingan tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan propinsi dan nasional disajikan pada Gambar 1. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti lebih banyak disebabkan daerah tertinggal. Daerah tersebut terpencar di wilayah pesisir dan terbatasnya sarana dan prasara terutama akses transportasi.



Sumber: Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, 2010

Gambar 1. Perbandingan Tingkat Kemiskinan Antar Kabupaten-Kota di Propinsi Riau dan Nasional

2. Kendala dalam Pembangunan Ekonomi di Pedesaan

Pembangunan ekonomi pedesaan terutama di daerah yang terpencil (tertinggal) tidak terlepas dari pembangunan sektor pertanian. Kondisi ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat pedesaan (sekitar 80%) mencari nafkah dari sektor pertanian yakni: perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, tanaman pangan dan hortikultura. Apabila ingin memacu pertumbuhan ekonomi di pedesaan salah satu prioritasnya adalah pengembangan sektor pertanian yang berbasis agribisnis. Untuk jenis agribisnis skala besar seperti perkebunan boleh dikatakan tidak banyak kendala, karena sektor perkebunan yang dikembangkan selama ini berorientasi ekspor yang dikelola oleh perusahaan besar. Namun yang jadi masalah adalah pengembangan ekonomi pedesaan dari usahatani skala kecil yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat.

Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil tersebut masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasiskan agribisnis dan agroindustri. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan pertanian khususnya petani skala kecil, antara lain: *Pertama*, lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar-kecilnya skala usaha yang dilakukan tergantung dari pemilikan modal. Secara umum pemilikan modal bagi masyarakat pedesaan masih relatif kecil, karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha sebelumnya. Untuk memodali usaha selanjutnya masyarakat desa (petani) terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu (pedagang) atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayarannya setelah panen. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan petani sering terjerat pada sistem pinjaman yang secara ekonomi merugikan pihak petani.

Kedua, ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah di pedesaan sebagai faktor produksi utama dalam pertanian makin bermasalah. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Dari sisi lain mengakibatkan terjadinya

pembagian penggunaan tanah untuk berbagai subsektor pertanian yang dikembangkan oleh petani.

Ketiga, pengadaan dan penyaluran sarana produksi. Sarana produksi sangat diperlukan dalam proses produksi untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Pengadaan sarana produksi di pedesaan itu bukan hanya menyangkut ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, tetapi yang lebih penting adalah jenis dan kualitasnya. Oleh karena itu pengadaan sarana produksi ini perlu direncanakan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan dipergunakan pada waktu yang tepat.

Keempat, terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian di pedesaan merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Petani yang bertindak sebagai manajer dan pekerja pada usaha taninya haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan berbagai faktor masukan usaha tani, sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha yang dilakukan.

Kelima, lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi (*top down*) dan penyaluran inspirasi (*bottom up*) para anggotanya. Dalam pertanian organisasi yang tidak kalah pentingnya adalah kelompok tani. Selama ini kelompok tani sudah terbukti menjadi wadah penggerak pengembangan pertanian di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari manfaat kelompok tani dalam hal memudahkan koordinasi, penyuluhan dan pemberian paket teknologi.

Keenam, kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumberdaya manusia yang memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Ada dua hal yang dapat dilihat berkaitan dengan sumberdaya manusia ini, yaitu jumlah yang tersedia dan kualitas sumberdaya manusia itu sendiri.

Kedua hal ini sering dijadikan sebagai indikator dalam menilai permasalahan yang ada pada kegiatan pertanian.

Secara umum permasalahan yang yang dihadapi dan harapan dalam pelaksanaan program pengetasan kemiskinan bagi masyarakat pedesaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Permasalahan dan Harapan pada Masyarakat Pedesaan

Kondisi saat ini	Kondisi yang diharapkan
Kurangnya budaya kewirausahaan	Pertanian yang berorientasi pasar
Belum berfungsinya lembaga ekonomi pedesaan (koperasi)	Tersedianya pelayanan lembaga ekonomi pedesaan yang memadai bagi masyarakat
Rendahnya kemampuan sumber daya manusia	Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang tinggi
Tingkat penguasaan ilmu dan teknologi yang rendah	Peningkatan ilmu dan penguasaan teknologi yang bisa mendukung inovasi.
Kurangnya informasi/penguasaan pasar	Peningkatan sistem manajemen informasi dan perluasan pangsa pasar
Keterbatasan modal untuk investasi dan modal kerja	Kecukupan modal guna pengembangan usaha dan kelanjutan usaha
Belum memiliki bentuk organisasi dan manajemen yang mampu menghadapi perubahan dengan cepat	Terbentuknya organisasi yang mampu menghadapi perubahan lingkungan dengan cepat dan manajemen yang profesional
Masih dirasakan adanya budaya lebih menyukai produk impor oleh sebagian konsumen	Adanya budaya cinta produk nasional
Masih kurangnya <i>political will</i> pemerintah	Adanya keberpihakan pemerintah terhadap petani

Sumber: Almasdi Syahza (2009)

3. Kendala dalam pemasaran produk pertanian

Pemasaran pertanian merupakan satu kesatuan urutan lembaga-lembaga pemasaran. Pemasaran bertujuan untuk memperlancar aliran produk pertanian dari produsen awal ke industri pengolah atau ke tangan konsumen akhir. Pemasaran produk pertanian mencakup banyak lembaga, baik yang berorientasi laba maupun nirlaba, baik yang terlibat dan terkait secara langsung maupun yang tidak terlibat atau terkait langsung dengan operasi sistem pemasaran pertanian. Khusus untuk beberapa komoditi terutama komoditi yang berorientasi ekspor seperti komoditi perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, pinang, gambir dan lain sebagainya) sering dihadapi dengan kendala pemasaran, terutama di daerah pedesaan. Bagi petani keterbatasan

pengetahuan dan ketidak jelian pasar justru dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku bisnis di daerah (yang dikenal dengan toke). Pelaku ini sering memanfaatkan kondisi di pedesaan untuk mempermainkan harga, sehingga pihak petani selalu berada pada posisi tawar menawar yang rendah. Bahkan dalam kondisi tertentu harga hanya ditentukan sepihak oleh para toke, akibatnya petani sebenarnya menghadapi pasar monopsonistic. Sebagai catatan toke adalah pedagang pengumpul hasil pertanian di pedesaan dengan memiliki berbagai fasilitas sarana dan prasarana serta modal yang kuat. Pada waktu tertentu petani diberi pinjaman uang untuk kebutuhan harian tanpa anggungan. Namun imbalannya adalah hasil pertanian harus dijual kepada toke. Pada kondisi ini si toke mempunyai kekuatan menawar dengan harga yang rendah. Dari sisi lain peluang si toke (kalau boleh disebut mafia pemasaran) memanfaatkan kelemahan pemasaran sektor pertanian di pedesaan.

Pemasaran dalam kegiatan pertanian dianggap memainkan peran ganda. Peran pertama merupakan peralihan harga antara produsen dengan konsumen. Peran kedua adalah transmisi fisik dari titik produksi (petani atau produsen) ke tempat pembelian (konsumen). Namun untuk memainkan kedua peran tersebut petani menghadapi berbagai kendala untuk memasarkan produk pertanian, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain:

1). *Kesinambungan produksi*

Salah satu penyebab timbulnya berbagai masalah pemasaran hasil pertanian berhubungan dengan sifat dan ciri khas produk pertanian, yaitu: *Pertama*, volume produksi yang kecil karena diusahakan dengan skala usaha kecil (*small scale farming*). Pada umumnya petani melakukan kegiatan usahatani dengan luas lahan yang sempit, yaitu kurang dari 0,5 ha. Di samping itu, teknologi yang digunakan masih sederhana dan belum dikelola secara intensif, sehingga produksinya belum optimal. *Kedua*, produksi bersifat musiman sehingga hanya tersedia pada waktu-waktu tertentu. Kondisi tersebut mengakibatkan pada saat musim produksi yang dihasilkan melimpah sehingga harga jual produk tersebut cenderung menurun. Sebaliknya pada saat tidak

musim produk yang tersedia terbatas dan harga jual melambung tinggi, sehingga pedagang-pedagang pengumpul harus menyediakan modal yang cukup besar untuk membeli produk tersebut. Bahkan pada saat-saat tertentu produk tersebut tidak tersedia sehingga perlu didatangkan dari daerah lain. *Ketiga*, lokasi usahatani yang terpencar-pencar sehingga menyulitkan dalam proses pengumpulan produksi. Hal ini disebabkan karena letak lokasi usahatani antara satu petani dengan petani lain berjauhan dan mereka selalu berusaha untuk mencari lokasi penanaman yang sesuai dengan keadaan tanah dan iklim yang cocok untuk tanaman yang diusahakan. Kondisi tersebut menyulitkan pedagang pengumpul dalam hal pengumpulan dan pengangkutan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan produk yang dihasilkan petani. Kondisi tersebut akan memperbesar biaya pemasaran. *Keempat*, sifat produk pertanian yang mudah rusak, berat dan memerlukan banyak tempat. Hal ini menyebabkan ada pedagang-pedagang tertentu yang tidak mampu menjual produk pertanian, karena secara ekonomis lebih menguntungkan menjual produk industri (agroindustri). Ketidak senambungan produksi pertanian merupakan celah bagi mafia pemasaran di pedesaan, baik waktu membeli hasil pertanian maupun waktu menjual kebutuhan petani di pedesaan terutama kebutuhan harian sebagai pendukung aktifitas di pedesaan.

2). Kurang memadainya pasar

Kurang memadainya pasar yang dimaksud berhubungan dengan cara penetapan harga dan pembayaran. Ada tiga cara penetapan harga jual produk pertanian yaitu: sesuai dengan harga yang berlaku; tawar-menawar; dan borongan. Pemasaran sesuai dengan harga yang berlaku tergantung pada penawaran dan permintaan yang mengikuti mekanisme pasar. Penetapan harga melalui tawar-menawar lebih bersifat kekeluargaan, apabila tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli maka transaksi terlaksana. Praktek pemasaran dengan cara borongan terjadi karena keadaan keuangan petani yang masih lemah. Cara ini terjadi melalui pedagang perantara. Pedagang perantara ini membeli produk dengan jalan memberikan uang muka kepada petani. Hal ini dilakukan sebagai jaminan terhadap produk yang diingini pedagang bersangkutan, sehingga petani tidak punya keberanian untuk

menjualnya kepada pedagang lain, karena ada rasa tanggung jawab pada janji yang telah disepakati antara petani dengan pedagang bersangkutan.

3). Panjangnya saluran pemasaran

Panjangnya saluran pemasaran menyebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan (marjin pemasaran yang tinggi) serta ada bagian yang dikeluarkan sebagai keuntungan pedagang. Hal tersebut cenderung memperkecil bagian yang diterima petani dan memperbesar biaya yang dibayarkan konsumen. Panjang pendeknya saluran pemasaran ditandai dengan jumlah pedagang perantara yang harus dilalui mulai dari petani sampai ke konsumen akhir.

4). Rendahnya kemampuan tawar-menawar

Kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan masih terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki, sehingga ada kecenderungan produk-produk yang dihasilkan dijual dengan harga yang rendah. Berdasarkan keadaan tersebut, maka yang meraih keuntungan besar pada umumnya adalah pihak pedagang. Keterbatasan modal tersebut berhubungan dengan: *Pertama*, sikap mental petani yang suka mendapatkan pinjaman kepada tengkulak dan pedagang perantara. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan petani yang tinggi pada pedagang perantara, sehingga petani selalu berada dalam posisi yang lemah; *Kedua*, fasilitas perkreditan yang disediakan pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain belum tahu tentang prosedur pinjaman, letak lembaga perkreditan yang jauh dari tempat tinggal, tidak mampu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Di samping itu khawatir terhadap risiko dan ketidakpastian selama proses produksi sehingga pada waktunya tidak mampu mengembalikan kredit. Ini menunjukkan pengetahuan dan pemahaman petani tentang masalah perkreditan masih terbatas, serta tingkat kepercayaan petani yang masih rendah.

5). Berfluktuasinya harga

Harga produksi hasil pertanian yang selalu berfluktuasi tergantung dari perubahan yang terjadi pada permintaan dan penawaran. Naik turunnya harga dapat terjadi dalam jangka pendek yaitu per bulan, per minggu bahkan per hari atau dapat pula terjadi dalam jangka panjang.

Untuk komoditas pertanian yang cepat rusak seperti sayur-sayuran dan buah-buahan pengaruh perubahan permintaan pasar kadang-kadang sangat menyolok sekali sehingga harga yang berlaku berubah dengan cepat. Hal ini dapat diamati perubahan harga pasar yang berbeda pada pagi, siang dan sore hari. Pada saat musim produk melimpah harga rendah, sebaliknya pada saat tidak musim harga meningkat drastis. Keadaan tersebut menyebabkan petani sulit dalam melakukan perencanaan produksi, begitu juga dengan pedagang sulit dalam memperkirakan permintaan.

6). *Kurang tersedianya informasi pasar*

Informasi pasar merupakan faktor yang menentukan apa yang diproduksi, di mana, mengapa, bagaimana dan untuk siapa produk dijual dengan keuntungan terbaik. Oleh sebab itu informasi pasar yang tepat dapat mengurangi resiko usaha sehingga pedagang dapat beroperasi dengan margin pemasaran yang rendah dan memberikan keuntungan bagi pedagang itu sendiri, produsen dan konsumen. Keterbatasan informasi pasar terkait dengan letak lokasi usahatani yang terpencil, pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data yang masih kurang dan lain sebagainya. Di samping itu, dengan pendidikan formal masyarakat khususnya petani masih sangat rendah menyebabkan kemampuan untuk mencerna atau menganalisis sumber informasi sangat terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan usahatani dilakukan tanpa melalui perencanaan yang matang. Dari pihak pemasaran, justru memanfaatkan kondisi ini untuk menekan harga jual demi mendapatkan keuntungan yang besar.

7). *Kurang jelasnya jaringan pemasaran*

Produsen dan/atau pedagang dari daerah sulit untuk menembus jaringan pemasaran yang ada di daerah lain karena pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan pemasaran tersebut dan tempat kegiatan berlangsung tidak diketahui. Di samping itu, tidak diketahui pula aturan-aturan yang berlaku dalam sistem tersebut. Hal ini menyebabkan produksi yang dihasilkan mengalami hambatan dalam hal perluasan jaringan pemasaran. Pada umumnya suatu jaringan pemasaran yang ada antara produsen dan pedagang memiliki suatu

kesepakatan yang membentuk suatu ikatan yang kuat. Kesepakatan tersebut merupakan suatu rahasia tidak tertulis yang sulit untuk diketahui oleh pihak lain.

8). Rendahnya kualitas produksi

Rendahnya kualitas produk yang dihasilkan karena penanganan yang dilakukan belum intensif. Masalah mutu ini timbul karena penanganan kegiatan mulai dari pra panen sampai dengan panen yang belum dilakukan dengan baik. Masalah mutu produk yang dihasilkan juga ditentukan pada kegiatan pasca panen, seperti melalui standarisasi dan *grading*. Standarisasi dapat memperlancar proses muat-bongkar dan menghemat ruangan. *Grading* dapat menghilangkan keperluan inspeksi, memudahkan perbandingan harga, mengurangi praktek kecurangan, dan mempercepat terjadinya proses jual beli. Dengan demikian kedua kegiatan tersebut dapat melindungi barang dari kerusakan, di samping itu juga mengurangi biaya angkut dan biaya penyimpanan.

Namun demikian kedua kegiatan tersebut sulit dilakukan untuk produksi hasil pertanian yang cepat rusak. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi antara lain mutu produk dapat berubah setelah berada di tempat tujuan, susut dan/atau rusak karena pengangkutan, penanganan dan penyimpanan. Hal ini menyebabkan produk yang sebelumnya telah diklasifikasikan berdasarkan mutu tertentu sesuai dengan permintaan dapat berubah sehingga dapat saja ditolak atau dibeli dengan harga yang lebih murah.

9). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia

Masalah pemasaran yang tak kalah pentingnya adalah rendahnya mutu sumberdaya manusia, khususnya di daerah pedesaan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini tidak pula didukung oleh fasilitas pelatihan yang memadai, sehingga penanganan produk mulai dari prapanen sampai ke pascapanen dan pemasaran tidak dilakukan dengan baik. Di samping itu, pembinaan petani selama ini lebih banyak kepada praktek budidaya dan belum mengarah kepada praktek pemasaran. Hal ini menyebabkan pengetahuan petani tentang pemasaran tetap saja kurang, sehingga subsistem pemasaran menjadi yang paling lemah dan perlu dibangun dalam sistem agribisnis.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi di perkotaan, yaitu kemampuan para pedagang perantara juga masih terbatas. Hal ini dapat diamati dari kemampuan melakukan negosiasi dengan mitra dagang dan mitra usaha yang bertaraf modern (swalayan, *supermarket*, restoran, hotel) masih langka. Padahal pasar modern merupakan peluang produk pertanian yang sangat bagus karena memberikan nilai tambah yang tinggi.

Untuk mengatasi masalah pemasaran produk pertanian yang dialami oleh petani, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Terutama yang terkait dengan pemasaran produk pertanian. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Untuk memperkuat tawar menawar di tingkat petani, petani harus bersatu dalam satu wadah kepentingan bersama dalam bentuk organisasi ekonomi atau badan usaha di tingkat desa melalui kelompok-kelompok usaha seperti koperasi. Tanpa koperasi tidak mungkin agribisnis kecil dapat berkembang. Koperasi inilah yang akan berhubungan dengan pengusaha besar. Melalui koperasi masalah yang dihadapi oleh petani dapat teratasi.

Koperasi merupakan badan usaha di pedesaan dan pelaksana penuh subsistem agribisnis. Dari sisi lain koperasi juga merupakan pedagang perantara dari produk pertanian yang dihasilkan oleh anggotanya. Koperasi berfungsi sebagai lembaga pemasaran dari produk pertanian. Dalam koperasi dilakukan pengolahan hasil (sortiran, pengolahan, pengepakan, pemberian label, dan penyimpanan) sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pasar. Koperasi juga berperan sebagai media informasi pasar, apakah menyangkut dengan peluang pasar, perkembangan harga, dan daya beli pasar. Melalui informasi pasar koperasi harus dapat menciptakan peluang pasar produk-produk pertanian, sehingga petani tidak ragu untuk melakukan kegiatan usahatani mereka karena ada jaminan dari koperasi bahwa produk mereka akan ditampung. Kegiatan ini akan merangsang partisipasi anggota terhadap koperasi, yang pada hakikatnya terjadi kesinambungan usaha koperasi.

Koperasi juga berperan sebagai penyedia kredit yang diperoleh dari lembaga perkreditan dan pengusaha. Pemberian kredit ini didasarkan kepada bentuk usaha pertanian yang mengembangkan komoditi unggulan dan punya

peluang pasar. Tingkat pengembalian kredit oleh petani dapat dilakukan melalui pemotongan penjualan hasil pertanian kepada koperasi.

Kegiatan unit usaha ini akan menimbulkan *multiplier effect* ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya usahata pertanian melalui sistem agribisnis sebagai unit usaha dapat menciptakan peluang usaha dalam kegiatan ekonomi sehingga menyebabkan naiknya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Melalui pembentukan koperasi agribisnis di pedesaan, maka mafia pemasaran di level bawah secara bertahap akan dapat dihilangkan.

4. Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Sejalan dengan pengembangan ekonomi Indonesia yang bertumpu kepada ekonomi kerakyatan, maka pemerintah kabupaten/kota melakukan pembangunan ekonomi harus berbasis kerakyatan. Pembangunan ekonomi terutama di pedesaan dalam rangka mengangkat marwah, derajat, harkat, martabat masyarakat pedesaan sebagai upaya mewujudkan program pengetasan kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pedesaan dan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang mobiltas barang dan penduduk desa-kota. Dalam upaya memacu pembangunan dari sisi aspek ekonomi dan sosial di daerah tertinggal, maka program pembangunan pedesaan harus memprioritaskan ketiga aspek tersebut.

a. Peningkatan Ekonomi Rakyat (Mengentaskan Kemiskinan)

Program pengetasan kemiskinan merupakan pendekatan pembangunan yang bersifat komprehensif dan mendasar dalam tataran kesejahteraan dan harkat yang manusiawi, oleh karena sekalipun kemiskinan merupakan fenomena ekonomi namun memberikan konsekwensi yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat yang mengalami kemiskinan tersebut menjadi rendah nilai-nilai kemanusiaannya sehingga dalam kehidupannya kurang bermarwah.

Khusus untuk daerah tertinggal pemilikan aset produktif seperti lahan sangat tidak adil, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dari hasil pengamatan terlihat penguasaan asset

produktif (lahan) di pedesaan lebih banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dan orang kota. Dampak dari semuanya ini terhadap mekanisme pasar yang dipengaruhi secara signifikan oleh aspek permodalan dan kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin. Masyarakat lebih banyak berhadapan dengan pasar yang bersifat monopsoni.

b). Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia (Pengetasan Kebodohan)

Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan dan percepatan pembangunan disuatu daerah. Apabila kualitas SDM rendah, maka masyarakat akan sulit menerima perubahan, mereka tidak mampu untuk mengikuti perubahan baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi kemajuan ekonomi. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasaan teknologi. Individu ataupun kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan.

c). Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk melancarkan dan mensukseskan pencapaian berbagai tujuan dan keinginan di berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kebodohan. Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota. Peningkatan ini hendaknya tidak saja melalui kuantitas tetapi juga kualitasnya yang meliputi fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan, fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan dapat mengembangkan potensi sumberdaya manusia (SDM) dan potensi sumberdaya alam (SDA) secara optimal dan dapat mengeliminasi kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar wilayah kabupaten/kota, serta antara pedesaan dengan perkotaan. Semuanya ini akan semakin mengangkat derajat, harkat, martabat dan marwah rakyat di daerah

pedesaan karena eksistensinya akan semakin diakui dan diperhitungkan dalam konteks persaingan global.

5. Kebijakan Pembangunan Daerah Tertinggal

Pembinaan terhadap kelembagaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal, seperti koperasi, usaha kecil dan menengah serta usaha mikro lainnya, harus dikembangkan guna terwujudnya struktur perekonomian yang kuat dengan didukung oleh ekonomi rakyat yang tangguh. Untuk mendukung mengembangkan perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan, dibutuhkan dukungan kebijakan dalam bentuk: 1) memberikan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta perubahan struktur masyarakat dengan pengembangan perencanaan pembangunan yang komprehensif/ partisipatif, demokratis, aspiratif dan transparan; 2) melakukan restrukturisasi dan redistribusi kepemilikan asset produktif kepada masyarakat pedesaan dengan memakai standar skala ekonomi keluarga sejahtera (3 ha/KK); 3) melakukan optimalisasi peran dan fungsi seluruh perusahaan agribisnis dan *forestry* (dengan Peraturan Daerah) sebagai investor di pedesaan untuk melakukan reinvestasi melalui kemitraan pola perusahaan patungan bersama pemerintah dan masyarakat pedesaan dalam membangun sistem perekonomian pedesaan; 4) mengembangkan usaha kecil, menengah, koperasi dan usaha mikro lainnya dengan cara peningkatan dan pengembangan keterkaitan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan; 5) mengembangkan bidang-bidang yang mempunyai keterkaitan dengan pengembangan bidang-bidang lainnya yaitu bidang industri, pertanian dalam arti luas, bidang transportasi, perdagangan, pariwisata serta bidang kelautan yang cukup strategis sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah; 6) meningkatkan upaya pembangunan infrastruktur terutama perhubungan darat, laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran lalu lintas orang dan barang; 7) mendorong upaya peningkatan nilai tambah (*value added*) sebagai produk pertanian yang dihasilkan oleh petani di pedesaan melalui sistem agribisnis dan agroindustri yang menekankan pada upaya pengembangan berbagai industri turunan; 8) memberdayakan lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat di

pedesaan sebagai wadah pengembangan kegiatan usaha produktif dan memberdayakan masyarakat miskin serta mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan mikro dalam rangka mendekatkan masyarakat pada akses permodalan guna mengembangkan ekonomi kerakyatan.

Kesimpulan

1. Dalam memacu pertumbuhan ekonomi, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama.. Karena sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian dengan lebih baik.
2. Pengembangan sektor pertanian ke depan harus diarahkan kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Pada hakekatnya dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis di daerah. Sektor pertanian (agribisnis) sebagai sektor ekonomi rakyat di pedesaan memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas.
3. Sektor pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai peluang untuk dikembangkan di masa datang, antara lain: 1) Penduduk yang semakin bertambah sehingga kebutuhan pangan juga bertambah; 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan kebutuhan pangan berkualitas dan beragam (diversifikasi); dan 3) Perkembangan agribisnis juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya diharapkan akan mengurangi ketimpangan pendapatan masyarakat.
4. Dalam pengembangan sektor pertanian skala kecil masih ditemui beberapa kendala, terutama dalam pengembangan sistem pertanian yang berbasis agribisnis dan agroindustri. Kendala tersebut, antara lain: 1) lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber permodalan; 2) ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah; 3) pengadaan dan

- penyaluran sarana produksi; 4) terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi; 5) lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani; 6) kurangnya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk sektor agribisnis.
5. Dalam pemasaran produk pertanian di pedesaan, petani menghadapi berbagai kendala, khususnya bagi petani berskala kecil. Masalah utama yang menyebabkan harga dapat dipermainkan oleh mafia pemasaran adalah melalui titik lemah produk pertanian, antara lain: 1) kesinambungan produksi; 2) kurang memadainya pasar; 3) panjangnya saluran pemasaran; 4) rendahnya kemampuan tawar-menawar; 5) berfluktuasinya harga; 6) kurang tersedianya informasi pasar; 7) kurang jelasnya jaringan pemasaran; 8) rendahnya kualitas produksi; dan 9) rendahnya kualitas sumberdaya manusia.

PUSTAKA ACUAN

- Alim, Muhammad Kholikul, 2007, Negara Vs. Kemiskinan Di Pedesaan, http://uploadoverload.blogs.friendster.com/my_blog/2007/07/negara_vs_kemis.html, 10 Agustus 2007.
- Bappeda Kabupaten Kepulauan Meranti, 2010., Data statistik Otonomi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemda kabupaten Kepulauan Meranti, Selat Panjang.
- Richardson, 2001, *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*, terjemahan Paul Sitohang, FE-UI, Jakarta.
- Syahza, Almasdi., 2007a. Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Syahza, Almasdi., 2007b. Percepatan Pemberdayaan Ekonomomi Masyarakat Pedesaan dengan Model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.XII/02/Juli/2007, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Syahza, Almasdi, 2008. Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Melalui Pemberdayaan Koperasi Berbasis Agribisnis Di Daerah Riau, Penelitian Fundamental DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Syahza, Almasdi, 2009. Kelapa Sawit, Dampaknya Terhadap Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Daerah Riau, Penelitian Hibah Kompetensi (tahun Pertama) DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Syamsuar, 2010., Harapan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.

Zainal, Rusli, 2010., Menciptakan Kabupaten Kepulauan Meranti Sebagai Hiterland Free Trade Zone Batam, Makalah pada seminar: *Peluang dan Tantangan Kabupaten Meranti dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Balitbangda Propinsi Riau, Pekanbaru.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada DP2M Dikti Jakarta melalui Lembaga Penelitian Universitas Riau yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti melauai penyediaan dana penelitian tahun anggaran 2012. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya ekonomi pedesaan.